

SKRIPSI

**“ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA”
(Study Tentang Mekanisme Pemberian dan Persedian Simpan Pinjam Usaha
Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



DI SUSUS OLEH :

LILIS HANDAYANI
10875004561

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DESA “(Study Tentang Mekanisme Pemberian dan Persedian Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”

Oleh : Lilis Handayani

Penelitian ini dilakukan pada Kantor UED-SP di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berlangsung mulai bulan Juni 2012. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa, khususnya UED-SP tentang Mekanisme Pemberian dan Persedian Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berpegang pada rasionalitas dan untuk mendukung penelitian ini maka ditetapkan sampel 78 orang sampel, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi Kuisioner dan di sertai dengan dokumen yang di peroleh di Kantor UED-SP. Wawancara dilakukan dengan Pegawai UED-SP Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Wawancara dan observasi juga dilakukan terhadap anggota UED-SP yang ada di Desa Tarai Bangun.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program UED-SP di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 44.02% menilai sudah sesuai dengan Pergub Riau No. 15 Tahun 2006, namun masih ada responden yang kurang sesuai yaitu 11,45%, bahkan ada responden yang belum sesuai sama sekali yaitu 2,39%. Artinya bahwa mekanisme program UED-SP Desa Tarai Bangun masih terdapat kekurangan, oleh karena masih adanya responden yang menilai kurang sesuai bahkan belum sesuai sama sekali. dan hal ini karena hanya sebagian item yang dinilai telah berjalan dengan baik atau sesuai dan sebagian lagi kurang sesuai atau belum sesuai .

Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka pengelola harus lebih banyak mengetahui tentang kelembagaan keuangan mikro terutama UED-SP, agar terciptanya suatu manajemen yang optimal agar tidak terjadinya kesalahan dilapangan. Sehubungan dengan hal itu maka perlu ditingkatkan pelatihan dan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan tersebut, supaya tujuan untuk mengentaskan kemiskinan bisa benar-benar terwujud.

Kata Kunci : Mekanisme Pemberian dan Persedian Simpan Pinjam.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmad, berkah, karunia, hidayah serta kasih sayangnya kepada penulis. Shalawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul” ***Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Study Tentang Mekanisme Pemberian dan Persedian Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)***”, guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian *comprehensive* untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada Ayahanda *Bpk. YUSUF* dan Ibunda tercinta *Ibu ERLIATI*, Terimah kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada Ananda. Dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini sehingga tercapainya keberhasilan ini.

Selama penulisan skripsi tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku rektor UIN SUSKA RIAU beserta Staf.
2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP. M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Drs.Almasri, M.Si selaku ketua Jurusan Administrasi Negara dan selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan serta arahan selama penulis mengikuti perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Afrinaldi Rustam, S.Ip, M.Si selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan arahan selama penulis mengikuti perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri SUSKA RIAU yang telah banyak memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Pegawai Kantor UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun serta warga setempat yang telah membantu dalam kelancaran pembuatan skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial serta seluruh teman satu angkatan 2008 khususnya Administrasi Negara C yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya, dan mereka telah memberikan dukungan, motivasi, saran, bantuan, serta do'a dalam penyusunan skripsi ini.

8. Keluarga Besar kakak dan abang : Yusneli, Hayatun Nupus, Bambang Irawan, Roni Pasla S.Sos, Melia Kontesa Amd, Nani Martina S.H, Bapak Drs. Amrullah dan Keluarga. Nenek dan keponakan Hazel, Adel, Bunga, Sindi, Dandi, Vivi, Pajri, dll yang selalu memberikan dukungan dan semangat I Lov all.
9. Spercial to teman dekat yang menjadi tempat curahan hati, saat sedih senang, marah saat menghadapi berbagai cobaan dll yaitu satu nama : Lie_V. Teman diluar kampus Iya, Iyus, Dll yang tidak di sebutkan satu persatu terima kasih teman.
10. Untuk mereka yang mengenal, mencintai saya, menyayangi serta memusuhi saya dengan segenap jiwa. Terima Kasih untuk do'a dukungan, caci maki kalian, itu semua menjadikan ku lebih dewasa.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan, dan doa' yang telah di berikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dan bermanfaat dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Amin ya Robbal Alamin.

Billahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru , Oktober , 2012
Penulis

LILIS HANDAYANI
10875004561

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	13
1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian	13
1.4. Sistematika	14
 BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1. Kerangka teori	16
2.1.1. Pemerintah	16
2.1.2. Kebijakan Pemerintah.....	18
2.1.3. Pemberdayaan Masyarakat	21
2.1.4. PPD (UED)	23
2.1.5. Desa	22
2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perseptif Islam	29
2.3. Hipotesis	32
2.4. Defenisi Konsep	32
2.5. Konsep Operasional.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian.....	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	35
3.3. Populasi dan Sampel.....	35
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5. Analisa Data	39

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Desa Tarai Bangun	40
4.1.1. Sejarah Desa.....	40
4.1.2. Letak Geografis Desa Tarai Bangun	41
4.1.3. Monografi Desa Tarai Bangun.....	42
4.1.4. Keadaan Ekonomi	44
4.2. Gambaran Umum PPD (UED)	44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden	53
5.2. Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Makmur di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.15 Tahun 2006	56
5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden tentang Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) di Desa Tarai Bangun	80
5.4. Faktor-Faktor Mengapa Pelaksanaan UED-SP Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Kurang Optimal	85

5.5. Kriteria desa yang mendapat dana Usaha Ekonomi Desa	87
5.6. Solusi	87

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan	89
6.2. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Provinsi Riau	2
Tabel I.2	Data Pemanfaat Dana Usaha Desa Tarai Bangun	9
Tabel I.3	Data Perguliran Dana Usaha Ekonomi Desa Tarai Bnagun	10
Tabel I.4	Daftar Penunggakan Pemanfaat Dana UED-SP Desa Tarai Bangun.....	11
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Desa Tarai Bangun.....	42
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan	43
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan.....	43
Tabel V.1	Jenis Kelamin Responden.....	53
Tabel V.2	Tingkat Pendidikan Responden.....	54
Tabel V.3	Jenis Usaha Responden	55
Tabel V.4	Penghasilan Responden Perbulan.....	56
Tabel V.5	Tanggapan Responden Tentang Pendataan dan Verifikasi Pemanfaat Dana Usaha Desa Melibatkan Warga Desa Tarai Bangun	58
Tabel V.6	Tanggapan Responden Tentang Pendataan dan verifikasi Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Desa Mengajukan Proposal Usulan Pinjaman.....	59
Tabel V.7	Tanggapan Responden tentang Pendataan dan Verifikasi Pemanfaat dana Usaha Ekonomi Mengajukan Anggunan ..	60
Tabel V.8	Tanggapan Responden tentang Pendataan dan Verifikasi Staf Analisis Kredit Menilai Proposal.....	61
Tabel V.9	Tanggapan Responden tentang Pendataan dan Verifikasi Pengelola Menilai dan Menyurvei Kelayakan Usaha	62
Tabel V.10	Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pendataan dan Verifikasi Program UED-SP Desa Tarai Bangun.....	63
Tabel V.11	Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Harus transparan atau Terbuka Kepada Masyarakat	66

Tabel V.12	Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) Perlunya Partisipasi Masyarakat.	67
Tabel V.13	Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi (UED-SP) Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).....	68
Tabel V.14	Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) tentang Pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3).....	69
Tabel V.15	Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi desa Simpan pinjam (UED-SP) tentang Pengalokasian Dana Pinjaman Kepada Masyarakat Miskin	70
Tabel V.16	Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan pinjam (UED-SP) digunakan Untuk Usaha Ekonomi Produktif	71
Tabel V.17	Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tarai Bnagun	72
Tabel V.18	Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Pemanfaat Membelanjakan Dana Pinjaman Sesuai SP3.....	75
Tabel V.19	Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Pemanfaat Mengembalikan Sesuai SP2K	76
Tabel V.20	Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dapat Mendorong Perekonomian Masyarakat.....	77
Tabel V.21	Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Dapat Mengurangi Kemiskinan	78
Tabel V.22	Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tarai Bangun	79
Tabel V.23	Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Perogram Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Desa Tarai Bangun	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Suatu keberhasilan pemerintahan daerah tentunya harus disertai dengan sistem yang baik. Begitu juga dengan program-program yang dijalankan harus berorientasi pada rakyat, oleh sebab itu pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh aparatur yang ada di pemerintahan daerah itu sendiri. Sasaran pemerintahan daerah pada hakikatnya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintahan pusat dan daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan dengan berbagai cara. Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintahan dalam melaksanakan program mensejahterakan masyarakat.

Fenomena kemiskinan yang bertolak belakang dengan kekayaan sumber daya alam Riau, mengidentifikasikan bahwa kemiskinan di Riau bukan disebabkan oleh kemiskinan alami, tetapi disebabkan oleh kemiskinan structural yang multi dimensional. Kemiskinan bukan hanya permasalahan ekonomi semata, tetapi merupakan hasil akhir interalasi factor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Akar permasalahannya adalah kebijakan pembangunan yang belum fokus pada masyarakat miskin.

Perkembangan penduduk miskin di Provinsi Riau mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2012 (dalam ribu jiwa) dapat dilihat dalam Table sebagai berikut :

Tabel I.1 : Perkembangan Penduduk Miskin di Prov. Riau

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Persentasi
	2005	600.4 Ribu Jiwa	12.51% Dari Total penduduk
	2006	338.6 Ribu Jiwa	564.9% Dari Total penduduk
	2007	575.5 Ribu Jiwa	11,20% Dari Total penduduk
	2008	566.7 Ribu Jiwa	10,63% Dari Total penduduk
	2009	527,5 Ribu Jiwa	9,48 % Dari Total penduduk
	2010	500,3 Ribu Jiwa	8,65 % Dari Total penduduk
	2011	482,1 Ribu Jiwa	8,47 % Dari Total penduduk
	2012	483,1 Ribu Jiwa	8,22 % Dari Total penduduk

Sumber: BPS, Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2012

Berdasarkan Tabel diatas sumber dari Biro Pusat Statistik dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi Riau yang paling banyak adalah pada tahun 2005 sebanyak 12.51% dari total penduduk 600.4 Ribu Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah pada tahun 2012 sebanyak 88.2% dari total penduduk 483.1 Ribu Jiwa.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan ini sangat diperlukan suatu proses pemberdayaan, dimana keberdayaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung sebagai prasyaratnya. Diantaranya adalah faktor pendidikan, kesehatan, penguasaan akses sumber-sumber kemajuan ekonomi dan faktor sosial budaya. Keterpaduan dari berbagai faktor tersebut secara serasi akan membentuk suatu kekuatan yang memungkinkan suatu masyarakat dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dalam kondisi apapun untuk mencapai tujuan hidupnya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksud agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Sesuai dengan Visi PPD yaitu mewujudkan masyarakat Riau yang sejahterah dan mandiri sesuai dengan Visi Riau 2020. Adapun Misi PPD yaitu:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Uaha Desa/Kelurahan,
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa,
3. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif,
4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan. (PERGUB Riau No. 15 tahun 2006)

PPD menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintahan Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

1. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk: penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja, penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin, dan penguatan peran aparat pemerintahan desa/kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk : Penguatan peran aparat pemerintahan desa/kelurahan, mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan, pembangunan desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan, dan penguatan kapasitas kelompok dan anggota usaha kecil dan menengah.

Dalam implementasinya, jenis kegiatan pada Program Pemberdayaan Desa meliputi (2) dua jenis kegiatan yaitu :

1. Kegiatan regular perencanaan pembangun desa/kelurahan melalui sektoral.
2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan Simpan Pinjam (UED/K-SP). (PERGUB Riau No. 15 tahun 2006)

Dalam program pemberdayaan desa, UED-SP adalah sebagai pelaksana kegiatan dana dengan memberikan pinjaman modal bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha menengah kebawah, dana yang diselenggarakan berasal dari pemerintahan kabupaten/kota kepada pemerintahan Desa dengan harapan bisa membantu perekonomian masyarakat Desa, sebagai langkah untuk proses mempercepat penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah daerah khususnya Propinsi Riau membuat suatu keputusan (No.592/IX/2004. tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan). Adapun tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan membangun infrastruktur. Salah satu program K2i diantaranya meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa (meningkatkan perekonomian desa). Salah satu pemerintah daerah, khususnya Riau maka Gubernur Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau No. 15 tahun 2006 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa .

Adapun pelaksanaan kegiatan dana usaha desa dapat kita lihat diantaranya sebagai berikut :

1. Pemanfaat wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang diajukan dan tertuang dalam dokument surat perjanjian pemberian kredit (SP2K).
2. Perubahan-perubahan terhadap jenis usaha yang didanai melalui dana usaha Desa/kelurahan, harus melalui proses verifikasi dilengkapi dengan berita acara.
3. Pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa/Kelurahan dari pemanfaat kepengelola UED/K-SP dilakukan sesuai dengan Surat perjanjian Pemberian kredit (SP2K) dengan mempertimbangkan siklus usaha beserta dengan jasa pinjaman yang disepakati bersama dalam musyawarah desa.
4. Pengembalian Dana Usaha Desa/Kelurahan dari UED/K-SP ke rekening Dana Usaha Desa/Kelurahan dilakukan sesuai dengan surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) beserta jasa sebesar 4% pertahun sebagai cadangan modal.
5. Pengelola UED membuat buku induk/anggota penerima manfaat Dana Usaha Desa dengan besar pinjaman, jangka waktu pengembalian dan besar angsuran per periode angsuran.
6. Pengelola UED wajib membuat buku kas umum, buku bank, kartu kredit monitoring sesuai dengan buku panduan keuangan.
7. Pengelola UED wajib membuat laporan bulanan kepada kepala Desa dengan Tembusan kepada BPD dan Pendamping Desa. Pelaporan UED Meliputi :
 - a. Laporan perkembangan pinjaman
 - b. Laporan operasional UED
 - c. Laporan status keuangan
 - d. Laporan permasalahan
 - e. Rencana kerja dan kegiatan UED
8. Pemanfaat/peminjam dapat membayar angsuran pinjaman ditambah jasa, melalui rekening UED atau melalui pengelola UED.
9. Perangkat Desa, BPD, pengelola UED, Pendamping Desa harus melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota/kelompok Pemanfaat.
10. Pengelola UED Melakukan rapat koordinasi bulanan bersama anggota/kelompok Pemanfaat, perangkat Desa, BPD, Pendamping Desa dan pihak terkait lainnya.

11. Jika diperlukan sewaktu-waktu akan dilakukan audit terhadap keuangan UED oleh lembaga yang berkompeten.
12. Kegiatan pra audit dilakukan antar Desa dapat dilakukan sebagai pembinaan dan penguatan kapasitas pengelola UED. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pra audit diambil dari biaya operasional UED dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat. Mengalokasikan Dana Usaha Desa (DUD), sekitar 10% sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat miskin (perorangan dan kelompok) dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Masyarakat miskin terlebih dahulu diberdayakan oleh pendamping Desa dan Pengelola UED sebelum mendapatkan pinjaman dana pinjaman.
 - b. Jaminan Tanggung Jawab Renteng diberlakukan bagi masyarakat miskin yang berkelompok.
 - c. Jaminan disesuaikan dengan kondisi desa setempat yang tidak memberatkan masyarakat miskin.
 - d. Kelayakan usaha tetap menjadi pertimbangan.
 - e. Besarnya pinjaman maksimal Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah, jasa pinjaman maksimal 10 % pertahun dan jangka waktu pinjaman maksimal 2 tahun, bagi masyarakat miskin berdasarkan penilaian Pendamping Desa dan Pengelola UED dikoordinasikan dengan coordinator Daerah. (PERGUB Riau)

Sedangkan persyaratan dan ketentuan masyarakat sebagai pemanfaat Dana Usaha Desa berdasarkan petunjuk teknis Program Pemberdayaan Desa Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut :

1. Warga Desa/Kelurahan yang telah berdomisili tetap di Desa/Kelurahan bersangkutan minimal 5 tahun.
2. Tercatat sebagai anggota aktif UED-SP dan telah mempunyai simpanan wajib sebesar minimal Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah).
3. Memiliki usaha dan atau rencana usaha.
4. Dinilai layak oleh tim verifikasi baik secara administrasi maupun usaha
5. Untuk peminjam perorangan diwajibkan menggunakan agunan.
6. Untuk peminjaman melalui kelompok dengan pinjaman lebih dari Rp.1.000.000; per anggota, maka diwajibkan menggunakan agunan sedangkan untuk nilai pinjaman dengan nilai maksimum Rp.1000.000; per anggota

anggunan dapat diganti dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng oleh Kelompok (sesuai dengan Kesepakatan Tanggung Renteng dalam kelompok).

7. Surat pernyataan kesanggupan tanggung renteng harus dibuat diatas kertas bermatrei dengan menyebutkan dana yang akan digunakan untuk tanggung renteng, ditandatangani oleh seluruh anggota peminjam.
8. Maksimal pinjaman lembaga UED/K-SP adalah Rp. 30.000.000,-. Batas maksimal ini dapat disepakati didesa atau kelurahan untuk memperkecilnya.
9. Pendamping desa wajib memfasilitasi seluruh peminjam dalam proses verifikasi. Untuk pinjaman dengan nilai Rp 15.000.000 s/d Rp 20.000.000,- harus ada rekomendasi dari koordinator daerah dalam penentuan kelayakan usahanya. Untuk pinjaman diatas RP 20.000.000,- s/d Rp 30.000.000,- harus ada rekomendasi dari leader untuk proses verivikasinya.
10. Peminjaman yang dinilai baik (pengembalian tepat waktu, tidak pernah menunggak) dapat diberikan tambahan pinjaman dengan besar 50% dari nilai pinjaman pertama.

Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang ini adalah satu satu desa yang terpilih untuk menjalankan PPD ini yang dikemas dalam Pemberian Dana Usaha Desa yaitu melalui UED-SP Sumber Makmur dengan karakter untuk menjadi pemanfaat dana UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ditetapkan melalui musyawarah yaitu sebagai berikut ;

1. Surat Keterangan Domisili
2. Memiliki KTP dan KK Desa Tarai Bangun Kec. Tambang
3. Anggunan calon pemanfaat
4. Memiliki tempat tinggal sendiri
5. Rencana Usaha Pemanfaat (RUP)
6. Melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh UED/K-SP
Desa Bangun Tarai Kec. Tambang.

Dari awal mula berdirinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam Sumber makmur di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sudah banyak yang memanfaatkan dana usaha ekonomi desa untuk mengimbangi pertumbuhan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya. Baik itu pemanfaatan dana dalam bentuk usaha barang maupun jasa, hal ini dapat dilihat dari Tabel pemanfaat dana di bawah ini.

Tabel I.2 : Data Pemanfaat Dana Usaha Desa Tarai Bangun

No	Jenis Usaha	Jumlah Orang	Jumlah Dana
1	Perdagangan	59	480,000,000
2	Pertanian	2	15,000,000
3	Perikanan	2	15,000,000
4	Peternakan	4	45,000,000
5	Industri Kecil	1	10,000,000
6	Jasa	10	71,500,000
	Jumlah	78	636,500,000

Sumber data : Kantor UED Sumber Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang 2011

Dari Tabel I.2 maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang memanfaatkan dana usaha ekonomi desa di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang untuk perdagangan sebanyak 59 orang, pertanian sebanyak 2 orang, perikanan 2 orang dan peternakan sebanyak 4 orang, industri kecil 1 orang dan dalam bentuk usaha jasa sebanyak 10 orang.

Menurut Sumber data kantor UED-SP Desa Tarai Bangun Kec. Tambang seperti dalam Tabel I.2 bahwa jumlah anggota pemanfaat dana mencapai 78 orang dan dengan perguliran dana sebagaimana dapat terlihat dalam Tabel dibawah ini.

Tabel I.3 : Data Perguliran Dana Usaha Desa Tarai Bangun

No	Tahap	Orang	Rupiah
1	Perguliran I	10	89,000,000
2	Perguliran II	11	90,500,000
3	Perguliran III	13	120,000,000
4	Perguliran IV	13	104,500,000
5	Perguliran V	9	68,000,000
6	Perguliran VI	3	16,000,000
7	Perguliran VII	5	31,500,000
8	Perguliran VIII	8	63,000,000
9	Perguliran IX	5	39,000,000
10	Perguliran X	1	15,000,000
	Jumlah	78	636,500,000

Sumber data : Kantor UED Sumber Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang 2011

Menurut keterangan Tabel di atas dapat dilihat bahwa perguliran dana dari mulai berdirinya UED-SP Desa Tarai Bangun Kec. Tambang sudah mencapai 10 tahap perguliran dana usaha desa yang digulirkan kepada pemanfaat sebanyak 78 orang pemanfaat dengan jumlah dana yang diberikan sebanyak Rp. 636.500.000 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan ketentuan dasar, pemanfaat dana usaha ekonomi desa wajib membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan rencana kegiatan yang telah diajukan

dalam dokumen surat pinjaman pemberian kredit (SP2K). Dana yang digunakan oleh pemanfaat merupakan kredit yang harus dikembalikan ke rekening Dana Usaha Desa (DUD-SP) dengan tingkat suku bunga minimal sebesar 12% per tahun serta jangka waktu maksimal 24 bulan, hal ini sesuai dengan isi Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) beserta jasa sebesar 4% pertahun sebagai cadangan modal UED untuk perguliran dana, dana 4% ini disetor oleh UED-SP ke rekening DUD-SP untuk tambahan modal DUD-SP.

Sementara itu, pelaksanaan kegiatan UED-SP yang berlokasi di Desa Bangun Tarai Kecamatan Tambang, masih mengalami beberapa kendala, seperti masih banyaknya penunggakan pembayaran kredit dalam setiap bulannya. Hal ini dapat kita buktikan terlihat dalam Tabel I.4 dibawah ini.

Tabel I.4 : Daftar Penunggakan Pemanfaat Dana UED-SP Desa Tarai Bangun.

No	Bulan	Orang	Tunggak
1	1 – 2	-	-
2	3 – 4	4	1.111.089
3	5 – 6	7	3.638.400
4	7 – 8	7	4.304.700
5	9 – 10	13	8.774.834
6	11 – 12	7	5.757.900
			23.486.923

Sumber data : Kantor UED Sumber Makmur Tarai Bangun Kecamatan Tambang 2011

Menurut Tabel I.4 di atas, dapat dilihat bahwa penunggakan pembayaran kredit tiap bulan terjadi peningkatan dari bulan ke bulan. Keadaan yang demikian bisa menimbulkan kredit macet, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaan simpan pinjam di Usaha Ekonomi Desa Sumber Makmur Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang karena dapat menimbulkan kerugian dan pengurangan persiapan dana dalam DUD di UED-SP tersebut, karena dana yang akan digulirkan kepada pemanfaat adalah dana yang bersumber dari pengembalian pinjam.

Berdasarkan pra survey lapangan, maka ditemui permasalahan yakni pemanfaat, dalam hal ini adalah masyarakat yang diberi pinjaman tidak dapat mengembalikan angsuran pinjaman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Ada sebagian masyarakat dibidang jenis usaha tertentu yang mengalami penunggakan dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini dikarenakan permasalahan-permasalahan seperti :

1. Dalam hal pembayaran, masyarakat tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dalam siklus yang ditetapkan, artinya masyarakat Desa ada yang melakukan tunggakan, dalam hal ini dikarenakan usaha yang mereka jalani mengalami kemacetan.
2. Telah terjadi penyalahgunaan dana pinjaman sebagai modal usaha pemanfaat, dimana dana tersebut digunakan untuk modal usaha tetapi sebaliknya mereka menggunakan untuk biaya konsumtif/kebutuhan sehari-hari.

3. Menurut pemanfaat masih minimnya informasi yang berkenaan dengan UED-SP.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis sangat tertarik ingin mengkaji dan meneliti lebih luas tentang *”Analisis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Studi Tentang Mekanisme Pemberian dan Persediaan Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)”*.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, sebagaimana yang di jelaskan dalam latar belakang maka dalam penelitian ini penulis dapat menetapkan permasalahannya. Yaitu **Bagaimanakah Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (Studi Tentang Mekanisme Pemberian dan Persediaan Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan menganalisis program pemberdayaan desa (Studi Tentang Mekanisme Pemberian dan Persediaan Simpan Pinjam Usaha Ekonomi di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah ;

1. Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah munculnya pengetahuan baru atau dukungan terhadap pengetahuan sebelumnya tentang pelaksanaan program pemberdayaan desa (Studi Tentang Mekanisme Pemberian dan Persediaan Pinjam Usaha Ekonomi Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini akan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan, maupun pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa
3. Manfaat Akademis yang diharapkan adalah guna memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam VI (enam) bab dan pada setiap babnya akan dirinci dalam beberapa sub bab dengan penjelasan :

BAB I : Dalam bab ini memaparkan dasar-dasar pokok pemikiran landasan penelitian yaitu terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II :** Dalam bab ini akan menjelaskan tentang uraian teoritis terhadap penelitian ini seperti teori pemerintahan, kebijakan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, PPD (UED), dan desa, juga berisi hipotesis, definisi konsep dan konsep operasional.
- BAB III :** Menjelaskan tentang lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.
- BAB IV :** Dalam bab ini mendeskripsikan kondisi umum Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, gambaran umum Program Pemberdayaan Desa Program Usaha Ekonomi Desa (UED).
- BAB V :** Dalam bab ini di uraikan mengenai pelaksanaan program Pemberdayaan Desa dan tentang persedian dana Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Desa (UED).
- BAB VI :** Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran, daftar pustaka, dan Lampiran

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ilmiah untuk memperdalam permasalahan maka fungsi telaah pustaka sangat membantu dalam menentukan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat. Teori adalah seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan dalam berbagai organisasi (Sugiono, 2007:55). Dengan demikian dalam memecahkan masalah tampak lebih jelas bahwa teori merupakan landasan yang kokoh suatu permasalahan.

2.1.1 Kebijakan Pemerintah

Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi sangat kompleks, yang mana selain berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan umum terhadap masyarakat, juga menjalankan fungsi pemberdayaan dan pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah ini sangat menentukan tercapainya keadilan dan kesejahteraan rakyat secara merata.

Pemerintahan sebagai organisasi kekuasaan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merekrut, dan mengubah lingkungan dengan menggunakan kewenangan, kekuatan, paksaan, dan kekerasan yang sah. Salah satu fungsi

pemerintahan adalah melaksanakan kebijakan dalam masyarakat, dengan kebijakan tersebut merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu dalam melaksanakan kebijakan pemerintah, dimana pemerintah membuat suatu kebijakan ataupun perda dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan kerjanya.

Pemerintahan dalam arti terluas adalah semua lembaga negara seperti didalam UUD Konstitusi suatu negara. Dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Yakni terdapat misalnya di Indonesia dibawah UUD 1945 : Kekuasaan Pemerintahan meliputi fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan.(UU No. 5 Tahun 1979)

Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif saja. Pemerintahan dalam arti tersempitnya yaitu lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi. (Talizuduhu Ndraha ; 2003 : 94)

Menurut Inu Kencana (2002:11) pemerintah adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan karismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai disiplin ilmu adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik.

Menurut Nurcholis (dalam Andri, 2011;21) mengatakan pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1. Memberikan pelayanan/*service* baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik/khalayak.
2. Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
3. Memberikan perlindungan/*protective* masyarakat.

Manajemen organisasi merupakan proses penanggungjawaban terciptanya proses kerja sama yang harmonis. Jika upaya itu diiringi dengan tindakan profesional dalam hal pengelompokan pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan merumuskan hubungan kerja, maka dapat memberikan daya dan hasil guna yang optimal kepada pencapaian tujuan organisasi.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan pemerintah merupakan sesuatu yang penting dalam mengatur, mengelola dan mengembangkan suatu lembaga dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah sampai menuju pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengatur dalam berbagai permasalahan yang ada sesuai dengan fungsi pemerintah itu sendiri.

2.1.2. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk menguraikan pengambilan keputusan.

Titmuss (dalam Edi Suharto, 2008;7) mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Menurutnya kebijakn itu senantiasa berorientasi pada masalah-masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented).

Proses kebijakan dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu :

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merekpresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi :
 - a. Penyusunan agenda kegiatan
 - b. Perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen pelaksanaan/*actuante*); dan
3. Evaluasi kinerja kebijakan (mempersentasikan fungsi manajemen pengawasan/*controlling*), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (Intern dan eksternal) dan pertanggung jawaban/*akuntabilitas* (Nugroho, 2004:123)

Menurut Nugroho (2004:85) bahwa kebijakan pemerintah/publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan pemerintah merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik, maka dalam proses pembuatannya tidak lepas dari beberapa konsep kunci sehingga dalam aplikasi atau penerapannya dapat terencana dengan baik. Menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik sebagai berikut :

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang di buat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata.

- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu..
- e. Sebuah justifikasi yang di buat oleh orang atau beberapa orang aktor.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang membuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam pencapaian tujuan tertentu.

Kebijakan pemerintah dalam memutuskan segala sesuatunya haruslah berdasarkan kepentingan umum/publik dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Kebijakan publik itu sendiri adalah merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan dengan jelas (Tangkilisan, 2008:3).

Dari beberapa definisi kebijakan pemerintah sebagaimana dijelaskan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan aturan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dengan demikian kebijakan pemerintah dalam memutuskan segala sesuatunya haruslah berdasarkan kepentingan umum/publik dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan tersebut tidak merugikan siapapun baik itu pemerintah ataupun masyarakat. Oleh karena itu kebijakan harus mampu memecahkan permasalahan ataupun mampu

memberikan keputusan yang terbaik baik itu untuk pemerintah dan masyarakat. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah pada umumnya khususnya kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar di Desa Tarai Bangun dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui Usaha Ekonomi Desa-SP.

Implementasikan kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan, maka implelementasi adalah:

1. Implementasikan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan
2. Tugas implementasikan adalah meningkatkan realisasi tujuan dengan hasil kegiatan pemerintah.

Implementasikan merupakan suatu proses penerapan ide, konsep kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Kebijakan harus mempunyai memecahkan permasalahan ataupun mampu memberikan keputusan yang terbaik baik itu untuk pemerintah dan masyarakat. Demikian juga dengan kebijakan pemerintah pada umumnya khususnya kebijakan pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengentaskan kemiskinan, kebodohan dan mensejahterakan masyarakatnya dengan melalui UED-SP

2.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat

mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan dirinya secara sendiri (PERGUB Riau No 15 tahun 2006 : kebijakan Umum).

Menurut Suharto (2006: 76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan biasanya ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang/ kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang/ kelompok yang diberdayakan.

Menurut Eko (2004: 11) pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat.

Menurut Zubaedi (2007:8) mengemukakan bahwa pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan efektif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Lebih lanjut Zubaedi menjelaskan pengembangan masyarakat seringkali diimplementasikan dalam beberapa bentuk kegiatan:

“ pertama, program-program pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh daya dukung dan kekuatan dalam memenuhi kebutuhannya. Kedua, kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan warga kurang mampu dapat dipenuhi oleh pihak lain yang bertanggung jawab (ibid,19).

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membuat masyarakat berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam lembaga swadaya masyarakat. Yang peduli pada pemberdayaan masyarakat harus dipandang sebagai pemacu untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat.

2.1.4 PPD (UED)

Pelaksanaan program pemberdayaan desa (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan. Dalam agenda nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengetasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan

Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis serta menunjukkan lokasi penerima bantuan dana usaha desa.

Adapun jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulagi masalah kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2i). Sedangkan menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya mempunyai 3 dimensi, yaitu :

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan terbuka dan penuh tanggung jawab.
2. Menyediakan dukungan yang kondusif untuk mewujudkan peranan masyarakat dalam pembangunan, khusus dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan dana usaha desa untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

PPD adalah program pembangunan yang sarat dengan muatan pemberdayaan masyarakat, karena itu dalam PPD menuntut untuk menempatkan masyarakat atau rakyat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus sebagai pelaku utama dalam setiap tahap kegiatan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,

pemerintahan daerah memberikan bantuan sejumlah dana kepada masyarakat desa/kelurahan guna untuk merangsang masyarakat untuk ikut serta aktif dalam pembangunan.

Dana bantuan dimaksud diberi nama Dana Usaha Desa/Kelurahan. Pemanfaatan dana tersebut harus memperhatikan sumber daya alam desa/kelurahan serta di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sasaran dari kegiatan ini adalah meingkatkan kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dikemas dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD). Adapun tujuan dari Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa.

Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang disingkat UED/K-SP adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang di bentuk oleh Desa/Kelurahan melalui musyawarah untuk mengelola Dana Usaha Desa dan dana yang berasal dari kegiatan simpan pinjam masyarakat.

Lembaga Usaha Ekonomi Desa (UED) yang dibentuk pemerintah sebagai lembaga penghubung kepada para unit-unit usaha kecil (sebagai pelaku ekonomi) yang membutuhkan perhatian dan bantuan permodalan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Sementara itu peran lembaga ekonomi akan menyalurkan kredit usaha (dana bergulir) kepada unit-unit kecil tersebut selanjutnya lembaga ekonomi yang dibentuk pemerintah itu dilakukan berbagai pendamping usaha dilapangan.

Usaha Ekonomi Desa (UED) merupakan bagian dari program K2i khususnya usaha ekonomi Desa yang sedang berjalan adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, sistem ekonomi kerakyatan mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan hingga pemantauan dan pelaporan. Untuk dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan (Usaha Ekonomi Desa) yang masih bersifat tradisional tersebut maka pemerintah melaksanakan suatu program yang disebut dengan usaha ekonomi Desa yang mana realisasi dari pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih demokratis melalui kebersamaan dan kemitraan yang saling menguntungkan
2. Menekankan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemantapan otonomi daerah
3. Menekankan perubahan struktur masyarakat dengan menghentikan monopoli yang merugikan dan mengendalikan kegiatan spekulatif
4. Mempereratkan hubungan manusia, antar daerah, antar sektor ekonomi, serta antara kegiatan makro dan mikro nasional melalui perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif.

Strategi dasar pelaksanaan usaha ekonomi Desa untuk menuju pada pemberdayaan masyarakat melalui 3 (tiga) hal yaitu:

1. Pemihakkan pada kepentingan masyarakat terbesar
2. Pemantapan otonomi dan pendelegasian wewenang dalam mengelola pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat.

3. Modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.

Adapun Misi yang ingin dicapai dari kegiatan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di Provinsi Riau secara khusus adalah :

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa.
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa.
3. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipativ.
4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi yang lebih banyak berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak yang umumnya berada di pedesaan itu, tentunya memerlukan koordinasi dan bahkan keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan antara berbagai instansi dan pengusaha agar lebih berhasil guna dan berdaya guna, dan agar tidak terjadi tumpang tindih antara sekian banyak program pembangunan. Hal itu dimaksudkan agar pengalaman pahit masa lalu yang membingungkan dan menjadi beban mental bagi rakyat tidak terulang. Oleh karena itu dalam upaya menerapkan konsep baru, di samping menyiapkan mental rakyat untuk bisa menerimanya, juga menyeleksi usaha-usaha ekonomi apa yang paling sesuai dengan suatu daerah sehingga tidak semua daerah melaksanakan program yang sama karena situasi dan kondisi dari masing-masing daerah berbeda.

Pada prinsipnya Dana Usaha Desa PPD sangat terbuka untuk membiayai segala jenis usaha yang diusulkan oleh masyarakat (kecuali beberapa jenis kegiatan yang dilarang), terutama kegiatan yang menguntungkan dan melibatkan masyarakat miskin, meningkatkan kesempatan berusaha serta memiliki potensi untuk berkembang dan berkelanjutan yang meliputi (BPPM, 2005):

1. Kegiatan ekonomi yang dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat Desa/Kelurahan serta mendorong pengembangan aktivitas ekonomi produktif, meningkatkan efisiensi berusaha dan memperkuat akses terhadap sentra produksi dan pasar.
2. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dapat memperluas kesempatan berusaha dan pengembangan usaha bagi kelompok masyarakat miskin.

Program pemberdayaan ekonomi kerakyatan (UED) dalam bentuk dana bergulir adalah bagian dari gerakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dimana merupakan salah satu strategi pemerataan pembangunan di daerah/Desa dan upaya konkrit dalam mengembangkan ekonomi rakyat pada masa otonomi daerah.

Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian modal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik

2.1.5 Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP NO 72 TAHUN 2005)

Kewenangan desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Islam

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang sakral bagi umat Islam. Sebab, al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat Islam pada khususnya. Pemberdayaan adalah salah satu visi-misi al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-Qur'an terus berlaku sacral sampai kapan pun dan dimana pun. Komitmen al-Qur'an menegakkan pemberdayaan sangat eksplisit. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan/pemberdayaan di dalam al- Qur'an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan 'ilm. Agenda pemberdayaan masyarakat juga sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah

SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 110 yang berbunyi;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ
خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang pasik.

Dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan kata zhulm, Itsm, dhalal, dll. dalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk membantu kalangan orang miskin, karena sesungguhnya rezki yang kita dapatkan itu datang dari Allah S.W.T agar kita bisa sama-sama berbagi terutama kepada orang-orang miskin. seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi ;

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً
 بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya :

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Qs. 59: 7)

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan

pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sesuatu yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan.

2.3 Hipotesis

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (sugiono, 2005:183) **"Di duga Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam mekanisme pemberian dan persedian simpan pinjam dana usaha ekonomi desa kurang optimal.**

2.4 Defenisi Konsep

Guna memudahkan penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa konsep, yang dioperasikan yaitu antara lain:

1. Program Pemberdayaan desa (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi melalui pemberian dana usaha desa.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.
3. Usaha Ekonomi Desa (UED) adalah suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan milik masyarakat desa yang diusahakan serta di kelola masyarakat desa.

4. Pemanfaat Dana Usaha Desa adalah anggota masyarakat Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
5. Pendataan dan verifikasi merupakan proses penting yang harus dilakukan agar mempermudah proses peminjaman dan mempermudah memantau perkembangan pinjaman DUD yang telah diberikan kepada masyarakat.
6. Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan Pengelolaan.
7. Pemamfaatan mengarahkan kepada peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan pemenuhan kebutuhan secara mandiri dengan pemberian bantuan dana sabagai modal dan dikembalikan secara kredit dengan jasa 12 %.
8. Desa adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah camat, yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

2.5 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep konsep operasional variable pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan dan verivikasi : 1) Warga desa 2) Membuat proposal usulan pinjaman 3) Mengajukan anggunan 4) Menilai proposal 5) Menilai kelayakan usaha melalui survei.

Dengan pengukuran:

Sangat Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Sangat Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Cukup Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Cukup Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Kurang Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Kurang Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Tidak Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Tidak Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

- b. Penyaluran: 1) Transparan 2) Partisipasi masyarakat 3) Membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K) 4) Membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3) 5) Mengalokasikan dana pinjaman kepada masyarakat miskin 6) Digunakan untuk usaha ekonomi produktif.

Dengan pengukuran:

Sangat Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Sangat Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Cukup Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Cukup Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Kurang Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Kurang Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

Tidak Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Tidak Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

- c. Pemanfaatan: 1) Membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan SP3 2) Mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan SP2K 3) Mendorong perekonomian masyarakat 4) Mengurangi kemiskinan.

Dengan pengukuran:

- Sangat Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Sangat Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006
- Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006
- Cukup Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Cukup Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006
- Kurang Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Kurang Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006
- Tidak Sesuai : Jika kebanyakan responden menilai Pendataan dan Verifikasi Dana Usaha Desa ini Tidak Sesuai dengan PERGUB No 15 Tahun 2006

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang menggunakan data yang diangkakan (scoring) dengan menggunakan skala pengukuran, mengembangkan kenyataan, realita yang ada di lapangan dengan menjelaskan beberapa fenomena-fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan tujuan bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui survey tersebut, akan dijadikan acuan untuk menggambarkan indikator penelitian. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan dalam tipe kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2007:90). Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiono, 2007:91). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota

pemanfaat UED-SP Desa Bangun Tarai Kecamatan Tambang yang berjumlah 78 orang sementara itu yang dijadikan sampel adalah 78 orang, memakai sampel jenuh dengan menggunakan metode sensus dimana besar sampel sama dengan besar populasi.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang diperoleh dilokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data yang diperoleh secara langsung dalam hal ini adalah pelaksana UED, masyarakat yang berkaitan peminjaman modal UED.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi :

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi UED-SP.
3. Laporan perkembangan UED-SP.
4. Data lain-lain yang menunjang penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung yang dilakukan dengan cara :

- a. Observasi : yaitu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi yang berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan.
- b. Wawancara : yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman data yang diperlukan dalam penelitian, Yakni pengelola UED-SP.
- c. Kuisioner : yaitu dengan membagikan daftar pertanyaan kepada responden dengan maksud agar memperoleh keterangan berdasarkan pilihan alternatif jawaban yang ada mengenai UED-SP yakni seluruh anggota pemanfaat.

3.6 Analisis Data

Analisa data yang penulis pergunakan adalah analisa data kualitatif. Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka data tersebut dikelompokkan menurut jenis datanya. kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan secara deskriptif analitik yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Desa Tarai Bangun

4.1.1 Sejarah Desa

Desa tarai bangun adalah nama suatu wilayah di kecamatan tambang kabupaten kampar yang menurut sejarah berdirinya adalah melalui pemekaran dari desa induk yaitu desa kualu. Pada awalnya desa tarai bangun merupakan wilayah kedesunan yang terbagi menjadi 2 (dua) wilayah yaitu dusun IV tarai dan dusun V rawa bangun. Seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan jumlah penduduk maka pada tahun 2000 terbentuklah panitia pemekaran persiapan desa tarai bangun. Semula tidaklah mudah untuk menyatukan visi, misi dan persepsi dalam kerangka membentuk sebuah desa yang definitif, berbagai aral melintang, konsekuensi dan tantangan seakan menjadi pengalaman dalam perjalanan waktu.

Terlepas dari terbatasnya infrastruktur dan sarana penunjang lainnya akhirnya pada tahun 2002 lahir sebuah desa (persiapan) tarai bangun dengan ditunjuk seorang Pejabat Sementara Kepala desa (PJS) yaitu bapak zainur, hingga akhirnya diangkat sebagai kepala desa definitif oleh bapak bupati kampar pada tahun 2004

Seperti biasa dalam roda pemerintahan juga bergulir, hingga pada tanggal 15 Juni 2008 Tarai Bangun Melaksanakan Pesta Demokrasi PILKADES dengan kearifan lokal jujur, adil dan kondusif. Drs H. Kamiruddin terpilih untuk masa jabatan Kepala Desa masa Bhakti 2008-2014. Heterogenitas masyarakat Tarai

Bangun baik dari suku, sosial, budaya dan agama menjadi acuan kedepan dalam Pembangunan dan menyatukan Visi dan Misi Desa Tarai Bangun kedepan, sehingga diharapkan masa yang akan datang Desa Tarai Bangun dapat berkembang selaras dan setara dengan desa-desa yang sudah maju dan tetap berpedoman dalam pengamalan pancasila dan undang-undang dasar 1945.

4.1.2 Letak geografis Desa Tarai Bangun

Desa Tarai bangun terletak di dalam wilayah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Karya Kotamadya Pekanbaru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tuah Karya Kotamadya Pekanbaru
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kualu Kecamatan Tambang

Luas wilayah Desa Tarai bangun adalah 13.5 Km² dimana wilayah berupa dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan kawasan padat hunian. Iklim Desa Tarai Bangun, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa.

4.1.3 Monografi Desa Tarai Bangun

Penduduk Desa Tarai Bangun berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang Heterogen berasal dari Derah Propinsi di Indonesia Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Tarai Bangun dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

4.1.3.1 Jumlah penduduk desa Tarai Bangun

Desa Tarai Bangun mempunyai jumlah penduduk 13.959 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 6870 jiwa, perempuan : 7089 orang dan 3610 KK, yang terbagi dalam Empat (IV) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Desa Tarai Bangun

DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	DUSUN IV
4824 Orang	3205 Orang	2560 Orang	3370 Orang

Sumber : Desa Tarai Bangun, 2011

Dari tabel IV.1 diatas jumlah penduduk paling banyak di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah dusun 1 yang berjumlah 4824 orang. Sedangkan yang paling sedikit penduduknya adalah dusun III yaitu 2560 orang.

4.1.3.2. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keadaan penduduk desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Tingkat Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Pasca Ssarjana
3492 org	1918 org	855 org	628 org	231 org	69 org

Sumber : Desa Tarai Bangun, 2011

Dari tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang paling banyak adalah pra sekolah atau tidak sekolah yaitu sebanyak 3492 orang. sedangkan paling sedikit adalah tingkat paska sarjana yaitu 69 orang.

4.1.3.3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan

Kemudian dilihat dari segi tingkat pekerjaan penduduk desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang kabupaten Kampar dilihat pada tabel IV. 3 berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pekerjaan

Petani	Pedagang	PNS	Buruh	Swasta	Wiraswasta.
360 KK	810 KK	155 KK	1065 KK	520 KK	710 KK

Sumber : Desa Tarai Bangun, 2011

Dari tabel IV.3 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut tingkat pekerjaan yang banyak adalah pedagang yaitu 810 KK. dan yang paling sedikit adalah PNS yaitu 155 KK.

4.1.4 Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Tarai Bangun secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, buruh tani, petani, perkebunan karet dan sawit dan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS pemda, Honorer, guru, tenaga medis, TNI/Polri, dll.

4.2. Gambaran Umum PPD (UED)

Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan PPD dan pelestarian program PPD. Kepala Desa bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :

- 1) Meyelenggarakan muswarah desa dalam rangka pelaksanaan PPD dan menyebarluaskan kepada seluruh masyarakat desa.
- 2) Mengesahkan daftar calon pemanfaat Dana Usaha Desa.
- 3) Menandatangani dokumen SP3.
- 4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian pinjaman Dana Usaha Desa.
- 5) Bersama-sama dengan ketua LPM/LKMK, wakil masyarakat perempuan yang dipilih melalui musyawarah desa, membuka rekening Dana Usaha Desa pada bank yang ditetapkan.
- 6) Bersama-sama dengan anggota pemegang otoritas rekening Dana Usaha Desa lainnya, melakukann pemindahbukuan (*over booking*) karena sesuai dengan pengajuan UED-SP yang tertuang dalam dokumen SP3.
- 7) Mendorong dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang terjadi di desa bersangkutan.
- 8) Membuat laporan bulanan kepada camat tentang perkembangan pelaksanaan PPD desa bersangkutan.

Ketua BPD atau petugas pengawasan umum bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :

- 1) Bersama pendamping desa dan pemerintahan desa memberikan informasi tentang kegiatan PPD kepada masyarakat desa.
- 2) Melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kegiatan PPD, evaluasi sasaran program serta pemanfaatannya.
- 3) Memastikan penyaluran Dana Usaha Desa telah memenuhi syarat dan ketentuan program yang berlaku.
- 4) Memantau realisasi penyaluran dan pengembalian dana pinjaman Dana Usaha Desa.
- 5) Mendorong masyarakat pemanfaat/peminjam bertanggungjawab dalam pengelolaan Dana Usaha Desa, sehingga pengembalian tepat waktu dan peguliran berjalan dengan baik.
- 6) Bersama kepala Desa dan pelaku PPD lainnya menyampaikan hasil musyawarah desa, khususnya kegiatan sektoral kepada kecamatan dan kota.
- 7) Mengikuti pelaksanaan kegiatan PPD pada tahap perencanaan pelaksanaan dan pelestarian/peguliran, khususnya dalam pertemuan-pertemuan desa.
- 8) Menandatangani SP3.

Ketua LPM bertugas dan berkewajiban sebagai berikut :

- 1) Bersama pendamping desa dengan melibatkan berbagai unsure/kelompok masyarakat yang ada, memberikan informasi tentang kegiatan Dana Usaha Desa.
- 2) Membantu kepala Desa melaksanakan pertemuan bersama pendamping desa melibatkan berbagai unsure/kelompok masyarakat yang ada untuk memberikan informasi tentang Dana Usaha Desa.
- 3) Bersama pendamping desa dan pengelola UED-SP mengumpulkan dan membahas aspirasi masyarakat atau kelompok masyarakat serta merumuskannya menjadi draf usulan.
- 4) Bersama kelompok masyarakat serta pendamping desa mengatur dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan.
- 5) Ketua LPM menandatangani speciment pada rekening Dana Usaha Desa.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program, direkrut pendamping yang disebut dengan fasilitator program untuk membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan pembangunan wilayah serta bantuan keahlian khusus yang disebut dengan pendamping desa. dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Melaporkan dan melakukan koordinasi dengan tim koordinasi kota, camat, aparat desa.
- 2) Melakukan sosialisasi PPD kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.
- 3) Melakukan identifikasi karakteristik (sumber daya manusia, kelembagaan dan ekonomi) desa.
- 4) Mengumpulkan, memverifikasi, validasi seluruh data penduduk miskin dari berbagai sumber yang ada kemudian di koordinasi dengan aparat desa selanjutnya dilaporkan kepada koordinator daerah.
- 5) Menfasilitasi forum musyawarah desa dan forum pertemuan kelompok/RT.
- 6) Melakukan kajian terhadap potensi desa.
- 7) Memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Dana Usaha Desa.
- 8) Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kualitas teknis dan kelayakan ekonomi usulan kegiatan serta proses verifikasi.
- 9) Membantu menyiapkan dan menyempurnakan dokumen kegiatan Dana Usaha Desa.
- 10) Menfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di desa dan melaporkan semua permasalahan terjadi kepada koordinator daerah.
- 11) Melakukan pemberdayaan secara khusus terhadap masyarakat miskin sehingga layak untuk diberikan pinjaman.
- 12) Melaksanakan prosedur Dana Usaha Desa dengan baik dan benar.
- 13) Melakukan verifikasi terhadap pinjaman dan peminjaman bahwa yang bersangkutan benar meminjam dan memanfaatkan dana UED-SP.
- 14) Sebelum pencairan Dana Usaha Desa dan dikoordinasikan dengan koordinator daerah.
- 15) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pada pemanfaatan dan UED-SP.

- 16) Membuat penilaian kebutuhan pelatihan, pengembangan paket-paket pelatihan yang tepat bagi pengelola UED-SP, kelompok masyarakat, kader pembangunan masyarakat/desa dan masyarakat umum.
- 17) Memfasilitasi dengan instansi terkait (lintas sektor) untuk bimbingan teknis terhadap penerapan teknologi usaha masyarakat yang berorientasi pasar dan bernilai ekonomi tinggi.
- 18) Membantu pengembangan potensi desa melalui kerjasama dengan dinas dan instansi terkait serta dengan dunia usaha yang ada.
- 19) Memfasilitasi pelaksanaan rakor bulanan desa.
- 20) Membuat laporan kegiatan kegiatan harian (absensi, realisasi dan rencana kerja) yang disampaikan kepada koordinator daerah setiap bulan.
- 21) Membuat laporan bulanan tentang pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada koordinator daerah dengan tebusan kepada lurah dan camat.
- 22) Membuat laporan khusus terhadap pemberdayaan masyarakat miskin setiap bulan.
- 23) Membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada koordinator daerah.
- 24) Bertanggungjawab terhadap kualitas pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- 25) Bertanggungjawab kepada korda dalam menyukseskan kegiatan PPD.
- 26) Mengikuti rapat koordinasi kota bersama koordinator daerah.

Pemegang otoritas rekening Dana Usaha Desa secara Umum mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Membuka rekening Dana Usaha Desa.
- 2) Menandatangani dokumen SPB dan dokumen yang dikeluarkan oleh BRI.
- 3) Menandatangani SP3
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan UED-SP.
- 5) Menghadiri rapat internal PPD di desa.
- 6) Memfasilitasi dalam penanganan masyarakat.

Secara umum tugas dan tanggungjawab pengelola UED-SP adalah :

- 1) Mensosialisasikan kegiatan Dana Usaha Desa kepada masyarakat desa dan mengumpulkan aspirasi masyarakat desa.
- 2) Mempersiapkan individu-individu rumah tangga/kelompok usaha penerima Dana Usaha Desa sehingga mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan

dokumen serta menyalurkan Dana Usaha Desa untuk kegiatan sesuai dengan rencana penggunaan kepada penerima Dana Usaha Desa.

- 3) Mengelola Dana Usaha Desa serta dana simpan pinjam masyarakat.
- 4) Mengatur dan memastikan perguliran dana sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- 5) Menyusun RKTL tahunan dan bulanan yang difasilitasi oleh pendamping Desa.
- 6) Pengelola UED-SP melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin selanjutnya diberi pinjaman.
- 7) Melakukan verifikasi terhadap usulan proposal masyarakat.

Ketua UED- SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Memimpin organisasi UED-SP.
- 2) Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada UED-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa atau peguliran yang memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan.
- 3) Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana UED-SP.
- 4) Mengawasi keputusan dana UED-SP
- 5) Mengangkat tenaga administrasi bila dibutuhkan sesuai dengan kemampuan keuangan UED-SP.
- 6) Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Desa serta pendamping Desa
- 7) Melakukan koordinasi dengan aparat desa, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, koordinator daerah, kader pembangunan masyarakat serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka menyampaikan laporan perkembangan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa.
- 8) Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan lembaga UED-SP.
- 9) Melaksanakan musyawarah pertanggung jawaban dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat.
- 10) Melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan Dana Usaha Desa kepada masyarakat.
- 11) Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.

- 12) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa di fasilitasi oleh pendamping Desa.
- 13) Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana UED-SP sesuai aturan
- 14) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh Pendamping Desa.

Kasir UED-SP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.
- 2) Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan UED-SP.
- 3) Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP secara periodik tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.
- 4) Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening simpan pinjam pada bank yang ditunjuk.
- 5) Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa dan difasilitasi oleh pendamping Desa.
- 6) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada dikas dan yang tersedia di bank.
- 7) Melakukan pengihan terhadap kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh pendamping desa.

Tata usaha mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Berfungsi sebagai sekretaris.
- 2) Membantu di bidang keuangan.
- 3) Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa dan didampingi oleh pendamping desa.
- 4) Membantu dibidang administrasi umum UED-SP.
- 5) Mengimpormasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.
- 6) Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada ketua UED-SP.
- 7) Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa.
- 8) Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa difasilitasi oleh pendamping Desa.

- 9) Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan UED-SP serta administrasi lainnya.

Staf analisis kredit mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

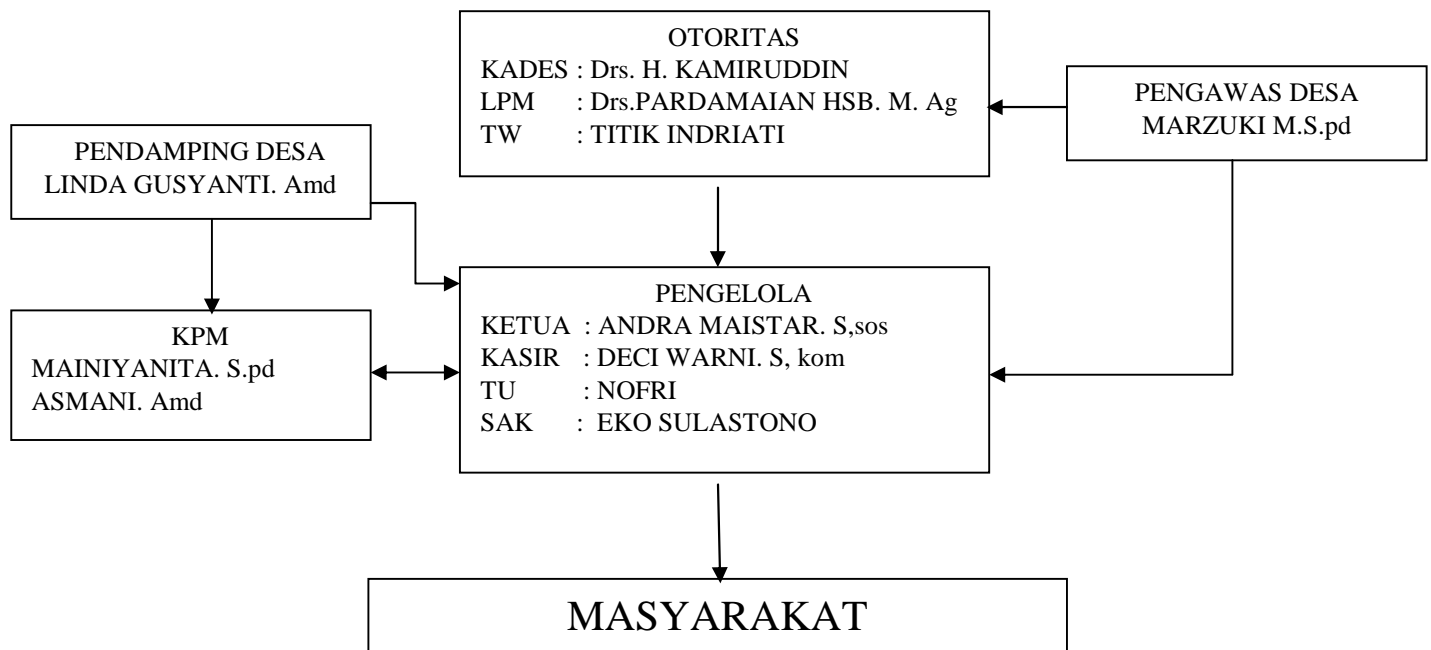
- 1) Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED-SP.
- 2) Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
 - a. Cek fisik kelayakan usaha,
 - b. cek fisik kelayakan bangunan,
 - c. Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat),
 - d. Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan,
- 3) Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.
- 4) Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.
- 5) Melakukan umpan balik kepada calon peminjam.
- 6) Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas Dana Usaha Desa, kader pembangunan masyarakat, pengawas umum dan pengelola SP dan pendamping desa.

Kader pembangunan masyarakat mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- 1) Mensosialisasikan program Dana Usaha Desa kepada semua masyarakat desa khususnya dalam tahap penyiapan masyarakat.
- 2) Membantu pendamping Desa dan pelaku lainnya di desa melakukan identifikasi potensi desa dan pengalihan gagasan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pendamping desa.
- 3) Bersama pendamping desa melakukan fasilitasi terhadap forum musyawarah desa.
- 4) Bersama pendamping desa mengembangkan kapasitas masyarakat desa dan kelompok kepentingan lainnya dalam perencanaan, organisasi dan pelaksanaan kegiatan dengan memfasilitasi pembentukan pengelola UED-SP.
- 5) Bersama pendamping desa dalam menyusun rencana pembangunan desa, program kerja, anggaran dan kontribusi local terhadap Dana Usaha Desa .

- 6) Bersama pendamping desa melakukan fasilitasi kepada masyarakat dalam pengajuan usulan kegiatan.
- 7) Bersama pendamping desa membantu pelaksanaan kegiatan verifikasi usulan oleh staf analisis kredit.
- 8) Bersama pendamping desa membantu pengelola UED-SP dalam pengelolaan dan perguliran dana kegiatan ekonomi.
- 9) Bersama pendamping desa memfasilitasi kelompok masyarakat dalam mendiskusikan gagasan yang diusulkan untuk pemecahan masalah.
- 10) Bersama pendamping desa membantu menyiapkan gagasan keningkat desa.
- 11) Bersama pendamping desa memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Usaha Desa.
- 12) Bersama pendamping desa memfasilitasi masyarakat untuk pembinaan paksa program, pelestarian dan pengembangan tindak lanjut kegiatan.
- 13) Membantu kepala desa dalam pelaporan kegiatan PPD.
- 14) Mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh program atau pihak lainnya.
- 15) Membuat laporan kegiatan secara berkala (bulanan) tepat waktu dan disampaikan kepada pendamping desa dan tebusannya disampaikan kepada kepala desa.

STRUKTUR KEPENGURUS UED-SP SUMBER MAKMUR DESA TARAI BANGUN



KETERANGAN :

- LPM : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 TW : Tokoh Wanita
 SAK : Staf Analisis Kredit
 KPM : Kader Pembangunan Masyarakat

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Sebelum hasil ini disampaikan, untuk memperoleh informasi penelitian maka peneliti akan menjabarkan identitas responden. Adapun responden disini adalah orang-orang yang telah dipilih menjadi sampel yang terlibat langsung dalam kegiatan kegiatan program UED-SP desa Tarai Bangun. Responden penelitian ini terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Untuk lebih jelas tentang responden ditinjau dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada table V.1 dibawah ini :

Tabel. V.I : Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	51	65,38%
2	Perempuan	27	34,62%
Jumlah		78	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Berdasarkan keterangan tabel V.I diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari jenis kelamin perempuan, yakni jumlah responden laki-laki sebanyak 51 orang atau 65,38% dan jumlah responden perempuan sebanyak 27 orang atau 34,62%.

Jumlah responden berdasarkan tabel diatas, juga memiliki memiliki pendidikan yang berbeda-beda. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini.

Tabel V.2 : Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	18	23.08%
2	SMP	34	43.59%
3	SMA	26	33.33%
Jumlah		78	100 %

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Menurut tabel V.2 diatas maka dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden pemanfaat dana usaha desa simpan pinjam (UED-SP) desa Tarai Bangun kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagian besar yaitu tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah 34 orang atau 43.59 %, dan tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 26 orang atau 33.33% serta yang memiliki pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 18 orang atau 23.08%. Berarti tingkat pendidikan pemanfaat dana usaha ekonomi desa (UED-SP) desa Tarai Bangun yang paling tinggi adalah tamatan SMP

Responden diatas juga memiliki jenis usaha yang berbeda pula, sebagaimana dapat dilihat pada tabel V.3 tentang jenis usaha pemanfaat dana usaha ekonomi desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sebagai berikut:

Tabel. V.3 : Jenis Usaha Responden

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Perdagangan	59	75,64%
2	Pertanian	2	2,56%
3	Perikanan	2	2,56%
4	Peternakan	4	5,12%
5	Industri Kecil	1	1,28%
6	Jasa	10	12,82%
Jumlah		78	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012

Menurut tabel diatas maka dapat dilihat bahwa jenis usaha perdagangan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jenis usaha lainnya, yaitu sebanyak 59 orang atau 75,64%, sementara jumlah jenis usaha yang paling sedikit dipilih responden yaitu jenis usaha industri kecil yakni 1 orang atau 1,28%. Sedangkan untuk jenis usaha pertanian dan perikanan sama-sama sebanyak 2 orang atau 2,56% dan peternakan sebanyak 4 orang atau 5,12% serta jenis usaha jasa sebanyak 10 orang atau 12,82%. Bearti pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) desa Tarai Bangun lebih menyukai usaha berdagang daripada yang lainnya.

Selanjutnya, tabel berikutnya mengenai penghasilan pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar perbulan yang akan dijelaskan dalam tabel V.4 dibawah ini :

Tabel. V.4 : Penghasilan Responden Perbulan

No	Penghasilan Perbulan	Jumlah	Persentase (%)
1	1000.000-2000.000	19	24.36%
2	2000.000-3000.000	8	10.26%
3	3000.000-4000.000	32	41.02%
4	4000.000-5000.000	13	16.67%
5	5000.000-6000.000	4	5.13%
6	6000.000-7000.000	2	2.56%
Jumlah		78	100 %

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2012

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa penghasilan kebanyakan responden (32 orang atau 41.02%) berada pada kelompok ketiga yaitu antara 3.000.000 s/d 4.000.000. Sedangkan responden paling sedikit (2 orang atau 2.56%) berada pada kelompok keenam yaitu 6.000.000 s/d 7.000.000.

5.2. Analisis Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) Sumber Makmur di Desa Tarai Bangun Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.15 Tahun 2006

Analisis program pemberdayaan desa (PPD) berdasarkan peraturan gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 studi pada mekanisme pemberian dan persediaan simpan pinjam usaha ekonomi desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Pendataan dan Verifikasi
2. Penyaluran

3. Pemanfaatan

Berdasarkan hal demikian, dalam penelitian ini akan diuraikan satu persatu dari setiap penilaian yang diberikan responden terhadap pelaksanaan Usaha ekonomi Desa-Simpan Pinjam desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, baik itu dengan menjawab kuesioner yang telah disebarkan maupun jawaban-jawaban responden sewaktu wawancara.

5.2.1. Pendataan dan Verifikasi

Untuk mencapai keberhasilan program UED-SP maka, proses pendataan dan verifikasi merupakan proses penting yang harus dilakukan agar mempermudah proses peminjaman dan pemantauan perkembangan pinjaman dana UED-SP yang telah diberikan kepada masyarakat. Proses ini juga membantu pengelola untuk lebih memfokuskan pemberian dana kepada sasaran yang benar-benar berhak mendapatkan dana UED-SP ini sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam pemberian dana tersebut.

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan pendataan dan verifikasi UED-SP ada 5 item diantaranya yaitu: Warga desa, membuat proposal usulan pinjaman, mengajukan anggunan, menilai proposal, menilai dan menyurvei kelayakkan usaha. Tiap item akan dipaparkan dibawah ini.

untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan pendataan dan verifikasi melibatkan warga Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel V.5 dibawah ini :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden Tentang Pendataan Dan Verifikasi Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Desa Melibatkan Warga Desa Tarai Bangun

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	27	34.61 %
2	Sesuai	38	48.72 %
3	Cukup Sesuai	13	16.67 %
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.5 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yakni 38 orang atau 48.72 % sesuai dan sangat sesuai sebanyak 27 Orang atau 34.61 % terhadap pendataan verifikasi yang melibatkan warga desa Tarai Bangun. Sebaliknya tidak ada satupun responden menilai pendataan dan verifikasi yang melibatkan warga desa Tarai Bangun kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sudah melibatkan warga Desa Tarai Bangun. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan responden yang menilai sangat sesuai dan sesuai terhadap pendataan dan verifikasi yang melibatkan warga Desa Tarai Bangun. Walaupun, masih ada responden yang menilai cukup sesuai yakni 13 orang atau 16.67 % berdasarkan hasil penelitian peneliti lapangan, bahwa mereka yang menilai cukup sesuai adalah mereka yang orang pendatang artinya bukan warga asli Tarai Bangun, tetapi mereka hanya berdomisili di desa tarai bangun belum mencapai tahap verifikasi yaitu selama 5 (lima) tahun yakni lebih kurang 3 s/d 4 tahun.

Sedangkan untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pendataan dan verifikasi UED-SP tentang pemanfaat mengajukan proposal usulan pinjaman dapat dilihat pada tabel V.6 berikut :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden Tentang Pendataan Dan Verifikasi Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Mengajukan Proposal Usulan Pinjaman

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	36	46.15 %
2	Sesuai	42	53.85 %
3	Cukup Sesuai	-	-
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.6 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 42 orang atau 53.85 % mengatakan sesuai, namun sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tentang pendataan dan verifikasi pemanfaat dana usaha desa mengajukan proposal usulan pinjaman kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan dan verifikasi mengenai pemanfaat usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) sudah sesuai mengajukan proposal usulan pinjaman terlebih dahulu. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 42 orang atau 53.85 % mengatakan sesuai.

Selanjutnya untuk melihat tanggapan responden tentang pendataan dan verifikasi pemanfaat dana usaha ekonomi desa mengajukan anggunan dapat dilihat pada tabel V.7 dibawah ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Tentang Pendataan Dan Verifikasi Pemanfaat Dana Usaha Ekonomi Mengajukan Anggunan

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	23	29.49 %
2	Sesuai	45	57.69 %
3	Cukup Sesuai	-	-
4	Kurang Sesuai	9	11.54 %
5	Belum Sesuai	1	1.28 %
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.7 diatas dapat dilihat bahwa kebanyakan responden yaitu 45 orang atau 57.69 % sesuai dengan pendataan dan verifikasi pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) mengajukan anggunan, namun sebaliknya masih ada responden yakni 9 orang atau 11.54 % yang kurang sesuai, bahkan ada yang belum sesuai sama sekali yakni 1 orang atau 1.28 %.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan dan verifikasi tentang pemanfaat dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) mengajukan anggunan sesuai. Karena sesuai dengan teknik pengukuran bahwa kebanyakan responden (57.69%) menilai pendataan dan verifikasi dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) mengajukan anggunan sudah sesuai. Namun, masih juga ada responden yang menilai kurang sesuai yakni 9 orang atau 11.54 % serta belum sesuai yaitu 1 orang atau 1.28 % hal ini disebabkan sesuai dengan hasil penelitian dilapangan bahwa mereka yang menilai kurang sesuai karena mereka tidak mengajukan anggunan sama sekali. Hal ini didukung oleh pernyataan responden mereka yang tidak mengajukan anggunan mendapatkan jalur khusus dari tim

pelaksana program artinya mereka memiliki ikatan keluarga atau mereka saling kenal maka masyarakat itu tidak perlu mengajukan anggunan.

Sementara untuk mengetahui pelaksanaan pendataan dan verifikasi tentang staf analisis kredit menilai proposal yang diajukan dapat dilihat pada tabel V.8 berikut:

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Tentang Pendataan Dan Verifikasi Staf Analisis Kredit Menilai Proposal

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	37	47.44 %
2	Sesuai	41	52.56 %
3	Cukup Sesuai	-	-
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.8 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 41 orang atau 52.56 % mengatakan sesuai, namun sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tentang pendataan dan verifikasi dana usaha desa simpan pinjam (UED-SP) staf analisis kredit menilai proposal usulan pinjaman kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan dan verifikasi mengenai staf analisis kredit menilai proposal usulan pinjaman dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 41 orang atau 52.56 % mengatakan sesuai. dan

berdasarkan penelitian peneliti lapangan bahwa setiap proposal usulan pinjaman calon pemanfaat dinilai oleh staf analisis sebelum mendapatkan dana pinjaman.

Untuk melihat tanggapan responden tentang pendataan dan verifikasi dana usaha ekonomi desa pengelola menilai dan menyurvei kelayakan usaha dapat dilihat pada tabel V.9 dibawah ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Tentang Pendataan Dan Verifikasi Pengelola Menilai dan Menyurvei Kelayakan Usaha

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	34	43.59 %
2	Sesuai	44	56.41 %
3	Cukup Sesuai	-	-
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.9 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 44 orang atau 56.41 % mengatakan sesuai, namun sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tentang pendataan dan verifikasi pengelola menilai dan menyurvei tentang kelayakan usaha kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pendataan dan verifikasi tentang pengelola menilai dan menyurvei kelayakan usaha yang akan dijalankan sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 44 orang atau 56.41 % mengatakan sesuai.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan pendataan dan verifikasi program UED-SP secara keseluruhan didesa tarai bangun dapat dilihat pada tabel V.10 berikut:

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pendataan Dan Verifikasi Program UED-SP Desa Tarai Bangun

No	Sub Indikator	Pengkuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Warga desa	27	38	13	-	-	78
		34.61%	48.72%	16.67%	-	-	100%
2	Mengajukan proposal usulan pinjaman	36	42	-	-	-	78
		47.15%	53.85%	-	-	-	100%
3	Mengajukan anggaran	23	45	-	9	1	78
		23.49%	57.69%	-	11.54%	1.28 %	100%
4	Menilai proposal	37	41	-	-	-	78
		47.44%	52.56%	-	-	-	100%
5	Menilai dan Menyurvei kelayakan usaha	34	44	-	-	-	78
		43.59%	56.41%	-	-	-	100%
6	Total	157	210	13	9	1	390
		40.26%	53.85%	3.33%	2.3%	0.26%	100%
7	Rata-rata	31.4	42	2.6	1.8	0.2	78
		40.26%	53.85%	3.33%	2.3%	0.26%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Keterangan :

SS : Sangat Sesuai

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai
 BS : Belum Sesuai

Dari tabel V.10 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 53.85 % menilai pendataan dan verifikasi program usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) sudah sesuai, namun ada responden yakni 2.3 % yang menilai kurang sesuai bahkan ada juga responden yaitu 0.26 % yang menilai belum sesuai sama sekali.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendataan dan verifikasi program UED-SP didesa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar sesuai berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 15 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.10 ternyata kebanyakan responden yaitu 53.85 % sudah sesuai terhadap pendataan dan verifikasi dana usaha ekonomi desa yang ada di desa Tarai Bangun.

Sesuai dengan penelitian dilapangan, peneliti juga melihat mekanisme tentang pendataan dan verifikasi UED-SP pelaksanaan pendataan dan verifikasi UED-SP Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang adalah sesuai berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 yaitu;

1. Pemanfaat dana usaha ekonomi desa UED-SP Desa Tarai Bangun adalah Warga Desa Tarai Bangun.
2. Pemanfaat dana usaha ekonomi desa UED-SP Desa Tarai Bangun Membuat Proposal Usulan Pinjaman.
3. Pemanfaat dana usaha ekonomi desa UED-SP Desa Tarai Bangun Mengajukan Anggunan.

4. Staf analisis kredit Menilai Proposal Pemanfaat dana usaha ekonomi desa UED-SP Desa Tarai Bangun.
5. Tim pengelola Menilai Kelayakan Usaha melalui Survei Pemanfaat dana usaha ekonomi desa UED-SP Desa Tarai Bangun.

5.2.2 Penyaluran

Penyaluran dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis dan keputusan pengelola berdasarkan hasil musyawarah kemudian dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Proses ini harus jelas dan praktis sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan mengerti tentang tahap-tahap penyaluran yang nantinya akan meminjam dana tersebut.

Adapun yang dilakukan atau indikator untuk penyaluran ini adalah sebagai berikut :

1. Harus Transparan.
2. Partisipasi masyarakat.
3. Membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K).
4. Membuat surat pemberian pinjaman(SP3).
5. Mengalokasikan dana pinjaman kepada masyarakat miskin.
6. Digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap penyaluran dana usaha desa yang diamanatkan oleh Pergub Riau No. 15 Tahun 2006 bahwa penyaluran dari pada dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) perlunya terbuka/transparan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel V.11 berikut :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harus Transparan atau terbuka kepada masyarakat.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	20	25.64%
2	Sesuai	47	60.26%
3	Cukup Sesuai	11	14.10%
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.11 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 41 orang atau 60.26% mengatakan sesuai, namun sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tentang ketransparanan pengelola kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran pengelola kepada masyarakat sudah transparan maka dikatakan sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 60.26 % mengatakan sesuai.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian ketu UED-Sp Desa Tarai Bangun Bapak Andra Maistar, S.Sos, yaitu:

“Pada setiap bulannya pengelola UED-SP Sumber Makmur akan menempelkan laporan bulanan tentang perkembangan UED-SP tarai bangun di papan informasi yang sudah disediakan dan begitu pula dengan hal-hal yang bersangkutan dengan UED-SP, seperti neraca UED-SP, ketentuan dan persyaratan pinjaman, daftar tunggu anggota dan masyarakat yang lebih mengenal UED-SP kami pengelola dengan senang hati melayaninya selaku masih dalam koridor yang baik. “

Untuk mengetahui tanggapan responden tentang pelaksanaan penyaluran dana usaha desa simpan pinjam UED-SP didesa tarai dengan mengikut sertakan

masyarakat atau perlunya partisipasi masyarakat dalam menjalankan program ini dapat dilihat pada tabel V.12 berikut:

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) perlunya partisipasi masyarakat.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	22	28.21%
2	Sesuai	47	60.26%
3	Cukup Sesuai	7	8.97%
4	Kurang Sesuai	2	2.56%
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.12 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 47 orang atau 60.26 % sudah sesuai terhadap penyaluran UED-SP telah melibatkan masyarakat, namun masih ada 2 orang atau 2.56% responden yang menilai kurang sesuai.

Dari tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran UED-SP desa tarai bangun sudah melibatkan masyarakat desa, karena terdapat kebanyakan responden yaitu 47 orang atau 60.26% menilai sudah sesuai.

Sama hal nya dengan penyampain ketua UED-SP Bapak Andra Maistar, S.Sos ketika peneliti bertanya mengenai bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penyaluran UED-SP yang dipimpinnya, beliau mengatakan:

”Pada setiap tahunnya kami mengadakan musyawarah anggota UED-SP untuk menetapkan beberapa hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan program UED-SP Sumber makmur desa tarai bangun. Juga kami pihak pengelola selalu mengharapkan partisipasi anggota untuk mensosialisasikan keberadaan UED-SP masyarakat desa tarai bangun.”

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya UED-SP desa tarai bangun sudah mengikut sertakan masyarakat.

Ketentuan penyaluran berikutnya adalah pemanfaat membuat surat perjanjian pemberian kredit (SP2K), dimana pelaksanaan penyaluran dana ini dengan membuat SP2K maka merupakan syarat daripada pencairan dana untuk pemanfaat. tanggapan responden tentang hal ini dapat dilihat pada tabel V.13 berikut ini :

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tentang pembuatan surat perjanjian pemberian kredit (SP2K)

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	18	23.08%
2	Sesuai	38	48.72 %
3	Cukup Sesuai	13	16.67 %
4	Kurang Sesuai	7	8.97 %
5	Belum Sesuai	2	2.56 %
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.13 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 38 orang atau 48.72 % sesuai terhadap penyaluran pemanfaat UED-SP membuat Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K), namun masih ada 7 orang atau 8.97 % responden yang menilai kurang sesuai, bahkan ada responden yang menilai belum sesuai sama sekali yakni 2 orang atau 2.56 % hal ini sesuai dengan hasil penelitian peneliti dilapangan bahwa mereka yang menilai kurang sesuai karena mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai SP2K, tetapi yang mereka ketahui bisa mendapatkan dana langsung dari pengelola dan pembayaran kredit dititipkan kepada pengelola tersebut.

Ketentuan penyaluran berikutnya adalah pemanfaat membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3), dimana pelaksanaan penyaluran dana ini dengan membuat SP3 maka merupakan syarat dari pada pencairan dana untuk pemanfaat. tanggapan responden tentang hal ini dapat dilihat pada tabel V.14 berikut ini :

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tentang pembuatan surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	25	32.05 %
2	Sesuai	40	51.28 %
3	Cukup Sesuai	13	16.67 %
4	Kurang Sesuai	-	-
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.14 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 40 orang atau 51.28% mengatakan sesuai, namun sebaliknya tidak ada satupun responden yang menilai tentang pembuatan surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) kurang sesuai dan belum sesuai sama sekali.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) pengelola telah membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) dana usaha ekonomi desa simpan-pinjam (UED-SP) sudah sesuai. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 40 orang atau 51.28 % mengatakan sesuai.

Hasil penelitian diatas juga didukung oleh penyampaian ketu UED-Sp Desa Tarai Bangun Bapak Andra Maistar, S.Sos, yaitu:

“Kami telah membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3) dan diserahkan kepada calon peminjam dana usaha ekonomi desa, hal ini kami lakukan jika terjadi kekeliruan dapat diselesaikan dengan baik karena telah ada bukti yang kuat tentang perjanjian pinjaman.”

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) tentang pengalokasian dana pinjaman kepada masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel V.15 berikut:

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) tentang pengalokasian dana pinjaman kepada masyarakat miskin.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	15	19.23 %
2	Sesuai	23	29.49 %
3	Cukup Sesuai	9	11.54 %
4	Kurang Sesuai	26	33.33 %
5	Belum Sesuai	5	6.41 %
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.15 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 26 orang atau 33.33 % kurang sesuai terhadap penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) tentang pengalokasian dana pinjaman kepada masyarakat miskin. Sedangkan responden yang menilai sesuai yaitu 23 orang atau 29.49%.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) mengalokasikan dana kepada masyarakat miskin kurang sesuai. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 26 orang atau 33.33 % kurang sesuai bahkan ada yang menilai belum sesuai sama sekali yakni 5 orang atau 6.41 %. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian peneliti

dilapangan bahwa mereka menyatakan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) tidak dialokasikan kepada masyarakat miskin tetapi kepada pengusaha.

Hal ini didukung juga dengan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yakni ibu Misraini selaku anggota UED-SP :

“Dana usaha ekonomi desa ini hanya diberikan untuk golongan pengusaha saja, terutama pedagang, kalau masyarakat biasa yang meminjam itu akan lama prosesnya, kecuali ada hubungan saudara dengan pengelola.”

Ketentuan penyaluran berikutnya tentang dana uasaha ekonomi desa digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif. tanggapan responden tentang hal ini dapat dilihat pada tabel V.16 berikut ini :

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Tentang Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	19	24.36 %
2	Sesuai	31	39.74 %
3	Cukup Sesuai	18	23.08 %
4	Kurang Sesuai	10	12.82 %
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.16 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 31 orang atau 39.74 % sesuai terhadap penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) digunakan untuk usaha ekonomi produktif. Sedangkan responden yang menilai kurang sesuai yaitu 10 orang atau 12.82 %.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) digunakan untuk usaha ekonpomi

produktif sudah sesuai yakni 31 orang atau 39.74 % namun masih ada yang menilai belum sesuai yakni 10 orang atau 12.82 %.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran dana usaha ekonomi desa (UED-SP) secara keseluruhan didesa tarai bangun dapat dilihat pada tabel V.17 berikut:

Tabel V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Penyaluran dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Desa Tarai Bangun

No	Sub Indikator	Pengukuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Transparan atau terbuka	20	47	11	-	-	78
		25.64%	60.26%	14.10%	-	-	100%
2	Partisipasi masyarakat	22	47	7	2	-	78
		28.21%	60.26%	8.97%	2.56%	-	100%
3	Membuat surat perjanjian pemberian kredit	18	38	13	7	2	78
		23.08%	48.72%	16.67%	8.97%	2.56%	100%
4	Membuat surat perjanjian pinjaman	25	40	13	-	-	78
		32.05%	51.28%	16.67%	-	-	100%
5	Mengalokai kan dana kepada masyarakat miskin	15	23	9	26	5	78
		19.23%	29.49%	11.54%	33.33%	6.41%	100%
6	Digunakan untuk usaha ekonmi produktif	19	31	18	10	-	78
		24.36%	39.74%	23.08%	12.82%	-	100%
7	Total	119	226	71	45	7	468
		25.43%	48.29%	15.17%	9.62%	1.49%	100%
8	Rata-rata	19.83	37.67	11.83	7.5	1.17	78
		25.43%	48.29%	15.17%	9.62%	1.49%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Keterangan :

SS : Sangat Sesuai
 S : Sesuai
 CS : Cukup Sesuai
 KS : Kurang Sesuai
 BS : Belum Sesuai

Dari uraian Tabel V.17 diatas dapat diketahui bahwa ternyata kebanyakan responden yaitu 48.29 % menilai penyaluran dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) didesa Tarai Bangun dapat dikategorikan sesuai namun masih ada juga responden yang kurang sesuai yakni 9.62 %, bahkan ada juga yaitu 1.49 % yang menilai belum sesuai sama sekali.

Artinya bahwa mekanisme penyaluran dana usaha ekonomi desa dapat dikategorikan sesuai karena penilaian terhadap seluruh item indikator, namun masih juga terdapat kekurangan hal ini dibuktikan karena masih adanya responden yang menilai kurang sesuai dan bahkan belum sesuai sama sekali terhadap item-item indikator penyaluran. Hal ini disebabkan sesuai penelitian dilapangan penilaian responden menilai karena pengalokasian dana masih belum optimal disalurkan kepada masyarakat miskin yang seharusnya tujuan dana pinjaman untuk membantu perekonomian masyarakat miskin.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran program UED-SP didesa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar sesuai berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 15 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.17 ternyata kebanyakan responden yaitu 48.29 % sudah sesuai terhadap penyaluran dana usaha ekonomi desa yang ada di desa Tarai Bangun.

5. 2.3 Pemanfaatan

Pemanfaat dana usaha desa adalah anggota masyarakat yang memanfaatkan dana usaha desa dan memenuhi persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis. Pemanfaatan mengarahkan kepada peningkatan kapasitas masyarakat dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan yang dilakukan dengan pemberian bantuan dana sebagai modal usaha dan memperluas kesempatan dan pengembangan usaha bagi masyarakat. Dengan adanya dana bantuan pinjaman diharapkan masyarakat mampu menciptakan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Adapun yang dilakukan atau indikator untuk pemanfaat ini adalah sebagai berikut :

1. Membelanjakan dana pinjaman sesuai SP3.
2. Mengembalikan dana sesuai dengan SP2K.
3. Mendorong perekonomian masyarakat.
4. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok masyarakat.
5. Mengurangi kemiskinan.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pemanfaatan dana usaha desa yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor. 15 Tahun 2006 bahwa pemanfaatan dari pada dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar membelanjakan sesuai dengan SP3 dapat dilihat pada tabel V.18 dibawah ini :

**Tabel V.18 : Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Dana Usaha
Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) membelanjakan dana
pinjaman sesuai SP3**

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	9	11.54 %
2	Sesuai	13	16.67 %
3	Cukup Sesuai	17	21.79 %
4	Kurang Sesuai	28	35.90 %
5	Belum Sesuai	11	14.10 %
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.18 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 28 orang atau 35.90 % kurang sesuai tentang pemanfaat membelanjakan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) sesuai SP3. Sedangkan responden yang menilai sangat sesuai yaitu 9 orang atau 11.54%. Artinya, pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) dikategorikan kurang sesuai. Hal ini sesuai dengan penelitian peneliti lapangan mereka yang menilai kurang sesuai karena dana digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan juga dana pinjaman pemanfaat hanya sebagai peminjan tetapi dana tersebut dimanfaatkan oleh saudaranya atau orang lain.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) membelanjakan dana pinjaman kurang sesuai dengan SP3. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 28 orang atau 35.90 % kurang sesuai walaupun ada yang menilai sangat sesuai yakni 9 orang atau 11.54 %.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pemanfaatan dana usaha desa yang diamanatkan oleh Pergub Riau No. 15 Tahun 2006 bahwa pemanfaatan dari

pada dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) mengembalikan sesuai dengan SP3 dapat dilihat pada tabel V.19 dibawah :

Tabel V.19 : Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) mengembalikan dana pinjaman sesuai SP2K

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	12	15.39 %
2	Sesuai	20	25.64 %
3	Cukup Sesuai	25	32.05 %
4	Kurang Sesuai	21	26.92 %
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.19 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 25 orang atau 32.05 % cukup sesuai pengembalian dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) sesuai SP2K. Sedangkan responden yang menilai kurang sesuai yaitu 21 orang atau 26.92 %.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) mengembalikan dana pinjaman cukup sesuai dengan SP2K. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 25 orang atau 32.05 % cukup sesuai walaupun ada yang menilai kurang sesuai yakni 21 orang atau 26.92 %.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pemanfaatan dana usaha desa yang diamanatkan oleh Pergub Riau No. 15 Tahun 2006 bahwa pemanfaatan dari pada dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dapat mendorong perekonomian masyarakat dilihat pada tabel V.20 dibawah :

Tabel V.20 : Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat mendorong perekonomian masyarakat

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	27	34.62 %
2	Sesuai	28	35.90 %
3	Cukup Sesuai	21	26.92 %
4	Kurang Sesuai	2	2.56 %
5	Belum Sesuai	-	-
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.20 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 28 orang atau 35.90 % sesuai pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dapat mendorong perekonomian masyarakat. Sedangkan responden yang menilai kurang sesuai yaitu 2 orang atau 2.56 %.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dapat mendorong perekonomian masyarakat sesuai. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 28 orang atau 35.90 % cukup sesuai walaupun ada yang menilai kurang sesuai yakni 2 orang atau 2.56 %.

Untuk melihat tanggapan responden terhadap pemanfaatan dana usaha desa yang diamanatkan oleh Pergub Riau No. 15 Tahun 2006 bahwa pemanfaatan dari pada dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar/pokok masyarakat dilihat pada tabel V.21 dibawah :

Tabel V.21 : Tanggapan Responden Tentang Pemanfaatan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dapat mengurangi kemiskinan.

No	Pengukuran	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Sangat Sesuai	-	-
2	Sesuai	18	23.08 %
3	Cukup Sesuai	22	28.20 %
4	Kurang Sesuai	29	37.18 %
5	Belum Sesuai	9	11.54 %
Jumlah		78	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Dari tabel V.21 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 29 orang atau 37.18 % kurang sesuai pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dapat mengurangi kemiskinan. Sedangkan responden yang menilai belum sesuai yaitu 9 orang atau 11.54 %. Artinya pemanfaatan dana usaha ekonmomi desa dapat mengurangi dikategorikan kurang sesuai. Hal ini sesuai dengan penelitan peneliti dilapangan bahwa mereka yang menilai kurang sesuai kebanyakan karena program ini membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk pemberdayaan.

Dari tanggapan responden diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) dapat mengiurangi kemiskinan kurangsesuasi. Hal ini dibuktikan dari kebanyakan responden yakni 29 orang atau 37.18 % kurang sesuai, bahkan ada yang menilai belum sesuai yakni 9 orang atau 11.54 %.

Selanjutnya, untuk mengetahui pelaksanaan pemanfaatan dana usaha ekonomi desa (UED-SP) secara keseluruhan didesa tarai bangun dapat dilihat pada tabel V.22 berikut:

Tabel V.22 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang pemanfaatan dana usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Desa Tarai Bangun

No	Sub Indikator	Pengkuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Membelanja kan sesuai SP3	9	13	17	28	11	78
		11.54%	16.67%	21.79%	36.59%	14.10%	100%
2	Mengembal ikan sesuai SP2K	12	20	25	21	-	78
		15.39%	25.64%	32.05%	26.92%	-	100%
3	Mendorong perekonomi an masyarakat	27	28	21	2	-	78
		34.62%	35.90%	26.92%	2.56%	-	100%
4	Mengurangi kemiskinan	-	18	22	29	9	78
		-	23.08%	29.20%	37.18%	11.54%	100%
5	Total	48	79	85	80	20	312
		15.39%	25.32%	27.24%	25.64%	6.41%	100%
6	Rata-rata	12	19.75	21.25	20	5	78
		15.39%	25.32%	27.24%	25.64%	6.41%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Keterangan :

SS : Sangat Sesuai

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

BS : Belum Sesuai

Dari uraian Tabel V.22 diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan responden yaitu 27.24 % menilai pemanfaatan dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) didesa Tarai Bangun cukup sesuai namun masih ada juga responden yang

kurang sesuai yakni 25.64 %, bahkan ada juga yaitu 6.41 % yang menilai belum sesuai sama sekali.

Dari data tabel diatas ada yang menilai kurang sesuai bahkan belum sesuai sama sekali ini sebabkan karena masyarakat atau pemanfaat dana tidak bisa mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan tempo bahkan sering terjadi penunggakan, data ini peneliti melihat dari pada papan informasi di UED-SP Sumber Makmur tersebut. Dan berdasarkan informasi dari warga setempat ada yang menggunakan dana tersebut hanya untuk membayar hutang nya di tempat lain. Melihat dari pada tersebut otomatis item yang kelima dari pemanfaatan dana ini dalam mengurangi kemiskinan cukup berhasil meskipun masih ada yang menilai belum sama sekali ini hanya 9 orang atau 11.54%.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemanfaatan program UED-SP didesa Tarai bangun Kec. Tambang Kab. Kampar cukup sesuai berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 15 Tahun 2006. Hal ini dapat dilihat dari tabel V.22 ternyata kebanyakan responden yaitu 27.24 % cukup sesuai terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana usaha ekonomi desa yang ada di desa Tarai Bangun.

5.3. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) di Desa Tarai Bangun Kec. Tambang

Dari beberapa uraian tabel sebelumnya mengenai tanggapan responden terhadap pelaksanaan program usaha ekonomi desa (UED-SP) di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kab. Kampar yang terdiri dari :

1. Tanggapan responden terhadap pendataan dan verifikasi pelaksanaan UED-SP

yaitu:

- 1) Warga desa
- 2) Membuat proposal usulan pinjaman
- 3) Mengajukan anggaran
- 4) Menilai prosal
- 5) Menilai kelayakan usaha melalui survey

2. Tanggapan responden terhadap pelaksanaan penyaluran dana program usaha

ekonomi desa yaitu :

- 1) Tranparansi
- 2) Partisipasi masyarakat
- 3) Membuat surat perjanjian pinjaman kredit (SP2K)
- 4) Membuat surat perjanjian pemberian pinjaman (SP3)
- 5) Mengalokasikan dana pinjaman kepada masyarakat miskin
- 6) Digunakan untuk usaha ekonmi produktif

3. Tanggapan responden terhadap pemanfaatan dana usaha ekonomi desa yaitu :

- 1) Membelanjakan dana pinjaman sesuai dengan SP3
- 2) Mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan SP2K
- 3) Mendorong perekonomian masyarakat
- 4) Mengurangi kemiskinan

Secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi jawaban responden tentang pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) dibawah ini.

Tabel V.23 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelaksanaan Program Ekonomi Desa (UED-SP) Desa Tarai Bangun

No	Sub Indikator	Pengkuran					Jumlah
		SS	S	CS	KS	BS	
1	Pendataan dan Verifikasi	157	210	13	9	1	390
		40.26%	53.85%	3.33%	2.3%	0.26%	100%
2	Penyaluran	119	226	71	45	7	468
		25.43%	48.29%	15.17%	9.62%	1.49%	100%
3	Pemanfaatan	48	79	85	80	20	312
		15.39%	25.32%	27.24%	25.64%	6.41%	100%
4	Total	324	515	169	134	28	1170
		27.69%	44.02%	14.45%	11.45%	2.39%	100%
5	Rata-rata	21.6	34.33	11.27	8.93	1.87	78
		27.69%	44.02%	14.45%	11.45%	2.39%	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2012

Keterangan :

SS : Sangat Sesuai

S : Sesuai

CS : Cukup Sesuai

KS : Kurang Sesuai

BS : Belum Sesuai

Dari tabel V.23 diatas tentang rekapitulasi tanggapan responden terhadap pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.15 tahun 2006, ternyata kebanyakan responden yaitu 44.02% menilai sudah sesuai, namun masih ada responden yang kurang sesuai yaitu 11,45%, bahkan ada responden yang belum sesuai sama sekali yaitu 2,39%. Artinya bahwa mekanisme

program UED-SP Desa Tarai Bangun masih terdapat kekurangan, oleh karena masih adanya responden yang menilai kurang sesuai bahkan belum sesuai sama sekali. Dan hal ini karena hanya sebagian item yang dinilai telah berjalan dengan baik atau sesuai dan sebagian lagi kurang sesuai atau belum sesuai.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kebanyakan sudah sesuai dengan peraturan Gubernur Riau No. 15 Tahun 2006. Dari ketiga indikator adalah mekanisme pelaksanaan program UED-SP di desa Tarai Bangun, yaitu pendataan dan verifikasi (sesuai), penyalurannya (sesuai) dan pemanfaatan (cukup sesuai).

Hal ini hanya sebagian item yang telah berjalan sesuai. Dengan demikian mekanisme pelaksanaan UED-SP desa Tarai Bangun termasuk dalam kategori sesuai dengan Pergub Riau No.15 Tahun 2006. Namun masih ada beberapa item yang kurang sesuai atau belum sesuai, seperti dalam indikator pengalokasian pada tabel V.15 yang mana item pengalokasian kepada masyarakat miskin kebanyakan mengatakan kurang sesuai. Selanjutnya pada indikator pemanfaatan pada tabel V.18 tentang pembelanjaan dari pada dana UED-SP kurang sesuai dengan SP3, dan pada tabel V.21 tentang pelaksanaan UED-SP dalam rangka mengurangi kemiskinan yaitu masih banyak yang mengatakan kurang sesuai. Karena masyarakat menilai dana kebanyakan dialokasikan kepada masyarakat berekonomi menengah keatas pemanfaatannya masih ada yang menyalah gunakan, dan penyalurannya hanya kepada orang tertentu saja.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data statistik Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana berikut :

1. Tingkat pengembalian pinjaman	: 96 %
2. Tingkat Tunggalan	: 3 %
3. Jumlah Peminjam	: 78 orang
1) Laki-laki	: 51 orang
2) Perempuan	: 27 orang
4. Peminjam Lunas	: 5 orang
5. Peminjam Belum Lunas	: 73
6. Saldo Pinjaman	: 636.500.000
7. Jumlah tunggakan	: 12.169.244
8. Jumlah Penunggak	: 18 orang
9. Peminjam Jatuh Tempo	: -
10. Nilai Jatuh Tempo	: Rp. –

Dari data statistik diatas pada poin satu dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian pinjaman oleh anggota UED-SP di desa Tarai Bangun sudah termasuk tinggi yaitu 96 %. Jadi dari data ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan UES-SP Desa Tarai Bangun sudah termasuk baik. Namun masih ada juga anggota yang mengembalikan pinjaman yang tidak jatuh tempo yaitu kebanyakan anggota peminjam, hal ini dapat dilihat berdasarkan data statistik yakni pinjaman jatuh tempo tidak ada sama sekali.

Masih menurut data statistik diatas yaitu pada poin dua, tujuh dan delapan dapat dilihat bahwa tunggakan tingkat masih tergolong banyak yaitu 18 orang atau 23% dari 78 anggota pemanfaat dana UED-SP dengan nilai tunggakan 12.169.244 rupiah atau 3% dari jumlah saldo pinjaman. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih banyaknya anggota yang tidak mau membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya, seperti yang terdapat pada data statistik diatas pada poin sembilan yakni pinjaman jatuh tempo tidak ada sama sekali. Sehingga yang demikian bisa mengakibatkan ketidakpastian pencairan dana kepada calon anggota yang sudah ada di daftar tunggu pemanfaat selanjutnya, karena dana yang digulirkan adalah dana yang berasal dari pembayaran pinjaman anggota.

Bila terjadi pengembalian kredit yang macet tentu saja akan sangat merugikan UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun yang lama kelamaan dapat mengancam eksistensi atau keberadaan usaha, hingga Desember 2011 jumlah pembayaran yang macet pengembaliannya adalah sebesar Rp. 12.169,244,- (Dua belas juta seratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah). Besarnya nilai tunggakan tentu sangat merugikan usaha UED-SP Sumber Makmur Desa Tarai Bangun. Untuk lebih jelas, nama-nama penunggak dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

5.4. Faktor-Faktor Mengapa Pelaksanaan UED-SP Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Kurang Optimal

Adapun faktor-faktor mengapa dana Usaha Ekonomi Desa di Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kurang bermanfaat dengan baik :

Karena Masyarakat Membelanjakan dana usaha ekonomi desa ini tidak sesuai dengan surat perjanjian pemberian pinjaman hal ini berdasarkan penilaian yaitu 36.59% mengatakan kurang sesuai, menurut pemanfaat ada sebagian yang tidak menggunakan dana pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan, malahan dana tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan wawancara peneliti dilapangan kepada seorang Pengelola kebetulan menjabat sebagai sekretaris di kantor Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam dan sekaligus sebagai pemanfaat dana UED-SP tersebut yaitu Bapak Nofri .

“ada sebagian warga atau pemanfaat dana UED-SP yang tidak membelanjakan dana UED-SP sesuai dengan SP3, alasannya mereka berpikir dana dari pemerintah itu harus dihabiskan karena dana tersebut berasal dari masyarakat juga, seperti kita membayar pajak. dari masyarakat harus maka mereka berpikir harus dihabiskan.”

Jadi dapat disimpulkan masyarakat kurang mengerti akan tujuan dari program PPD ini khususnya penggunaan dari pada dana simpan pinjam ini, bahwa tujuan daripada program ini adalah memberantas kemiskinan. Untuk mensejahterakan masyarakat.

Permasalahan penelitian diatas juga didukung oleh laporan pertanggung jawaban (LPJ-UED) desa Tarai Bangun pada tahun buku 2011. Dimana dari sisi manajemen masih ada kelemahan secara umum yang terjadi diantaranya:

1. Fungsi manajemen belum optimal
2. Kerjasama antar personil lemah
3. Partisipasi aktif anggota terhadap lembaga masih rendah

4. Pengetahuan pengelola tentang kelembagaan keuangan mikro terutama UED-SP masih kurang
5. Sosialisasi masih belum maksimal dan terbatas.

5.5 Kriteria desa yang mendapat dana Usaha Ekonomi Desa

Adapun kriteria desa yang bisa mendapatkan bantuan dana Usaha Ekonomi Desa harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut;

1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sumber Daya Alam (SDA)
3. Sarana Prasarana Desa
4. Desa yang tidak pernah pernah di black list pada program pemerintahan seperti, KUD, PNPM dan program lainnya.

5.6 Solusi

Pada dasarnya masalah yang diuraikan diatas berasal dari penyaluran dan pemanfaatan dana usaha ekonomi desa (UED) yang mana seharusnya pengelola dan pemanfaat lebih antusias terhadap program pemberdayaan ini, mereka seharusnya lebih mengerti akan tujuan dari pada program ini, karena akar dari pada permasalahan ini adalah kemiskinan, tujuan pemerintah membuat program ini yaitu untuk memberantas kemiskinan itu sendiri.

Untuk mengatasi masalah ini penulis memberikan solusi sebagai berikut :

1. Pengelola lebih memahami maksud dari PPD sehingga tujuan dari pada program yang dibuat pemerintah bisa tercapai. Sebisa mungkin penyuluhan-penyuluhan lebih ditingkatkan lagi baik untuk pengelola maupun pemanfaat.

2. Pihak pengelola terlebih dahulu mengadakan analisis kredit secara benar, pemberian kredit tanpa analisis akan menyebabkan suatu resiko, dimana nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif seperti menggunakan data-data saudaranya. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang diberikan akan sulit untuk ditagih.
3. Untuk pemanfaat seiring dengan terjadinya kemacetan/penunggakan tiap bulannya maka pihak pengelola lebih mempertegas lagi akan sanksi² supaya tidak lagi terjadinya kemacetan.
4. Sedangkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dana yang dipinjam, pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana harus lebih ditingkatkan lagi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan tabel V.23 sebelumnya, hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pelaksanaan program pemberdayaan desa (studi tentang mekanisme pemberian dan persediaan simpan pinjam (UED-SP) di desa Tarai Bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.15 tahun 2006 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa pada Program Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan program pemberdayaan desa studi tentang mekanisme pemberian dan persediaan simpan pinjam (UED-SP) di desa Tarai Bangun kecamatan tambang kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.15 tahun 2006 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa pada Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam. Hal ini dapat dilihat dari :

- 1) Pendataan dan Verifikasi,
 - a. Pemanfaatan dana UED sudah merupakan warga desa tarai bangun,
 - b. Pemanfaat sudah terlebih dahulu membuat proposal usulan pinjaman,
 - c. Pemanfaat sudah mengajukan anggaran,
 - d. Pengelola sudah menilai proposal yang diajukan,
 - e. Pengelola sudah menilai kelayakan usaha melalui survey.

2) Penyaluran

- a. Pengelolaan dana UED-SP desa Tarai Bangun dalam pelaksanaan sudah transparan atau terbuka kepada masyarakat,
- b. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan terutama UED-SP ini,
- c. Pengelola sudah membuat Surat Perjanjian Pengembalian Kredit (SP2K),
- d. Pengelola sudah membuat Surat Perjanjian Pemberian Pinjaman (SP3),
- e. Pengelola dana Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) di desa Tarai Bangun masih kurang dalam mengalokasikan kepada masyarakat miskin, terkadang agak sulit bagi masyarakat miskin untuk meminjam,
- f. Dana usaha ekonomi desa yang dikelola oleh lembaga UED-SP di desa Tarai Bangun hanya digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.

3) Pemanfaatan

- a. Masyarakat desa Tarai Bangun masih kurang kesadarannya akan penggunaan dana usaha ekonomi desa, terkadang malah menyalahgunakan,
- b. Pengembalian dana usaha ekonomi desa sudah tergolong lancar, walaupun masih ada tapi itu hanya 3% nya saja,
- c. Dana usaha ekonomi desa di desa Tarai Bangun sudah mendorong perekonomian masyarakat setempat,
- d. Dana usaha ekonomi desa di Desa Tarai Bangun sudah cukup membantu mengurangi kemiskinan.

6. 2. Saran-Saran

Demi mencapai pelaksanaan Program UED-SP di desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang lebih baik, penulis ingin memberi saran kepada pengelola dan pemanfaat dana Usaha Tarai Bangun, sebagai berikut :

1. Sebaiknya agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan maksimal maka pemerintah lebih mensosialisasikan program pemberdayaan ini terutama kegiatan usaha ekonomi desa ini ditingkatkan lagi baik kepada pengelola maupun pemanfaat.
2. Diharapkan kepada tim pelaksana program untuk lebih mengawasi mereka dan memberikan bimbingan, arahan, dan keterampilan sehingga masyarakat dapat mengoptimalkan dana pinjaman dengan sebaik-baik mungkin dengan demikian masyarakat juga tidak akan menyalahgunakan lagi dana yang mereka dapatkan.
3. Diharapkan kepada tim pelaksana program untuk memberikan juga pinjaman kepada masyarakat yang tidak mempunyai usaha, agar masyarakat tersebut juga dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri secara mandiri.
4. Diharapkan juga kepada pendamping agar optimal lagi mengawasi pelaksanaan UED-SP dan proses penyaluran dana oleh pengurus UED-SP, sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pemberian dana pinjaman kepada masyarakat.

5. Sebaiknya pemberian pinjaman lebih ditingkatkan lagi dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan dana tersebut untuk lebih meningkatkan usaha mereka. Dan dengan penambahan tersebut masyarakat tidak lagi mengalami penunggakan dalam hal pembayaran.
6. Kepada pemanfaat, agar pelaksanaan program UED-SP Desa Tarai Bangun dapat berjalan dengan lancar, tingkatkanlah kesadaran tentang kewajiban mengembalikan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Suharto Edi. 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, ALFABETA, Jakarta.
- Thamrin Husni. 2008, *Metodologi Penelitian*, Suska Press, Riau.
- Juliansyah Noor. 2011, *Metodologi Penelitian*, Kencana, Jakarta.
- Syafiie Inu Kencana. 2005, *Menejemen Pemerintahan*, PT. PERCA, Jakarta.
- Kansil, CST dan Kristine. 2001, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Widjaja, HAW. 2002, *Otonomi Daerah dan Derah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wicaksono, Kristian Widya. 2006, *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003, *KYBERNOLOGI (ilmu Pemerintahan Baru)*. RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Sugiono. 2005, *Metode Penelitian Administrasi*, ALFABETA, Bandung.
- Bungin, Burhan. 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nugroho, Riant D. 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, PT. Elex Media Kopetindo, Jakarta.
- Eko, Sutaro. 2004, *Reformasi Politik Dan Pemberdayaan Masyarakat*, APMD Press, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2006, *Membangun masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Labolo, Muhadam. 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono. 2007, *Metode Penelitian Administrasi Negara*, Alfabeta, Bandung.

Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif*, Ar-ruzz Media, Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008, *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Lukman Offset, Yogyakarta.

Dokumentasi :

Efendi, Riza. (Skripsi, 2010), *Implementasi Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006. Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)*, Universitas Islam Negeri.

Septrizon, Andri. (Skripsi, 2011), *Evaluasi Program Pemberdayaan Desa (Studi Tentang Mekanisme Dan Penyediaan Pinjaman Usaha Ekonomi Desa Di Desa Pualau Lancang Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi)*. Universitas Islam Riau.

Laporan Pertanggungjawaban Pengelola UED-SP Sumber Makmur, Tahun buku 2011 Tanggal 27 Februari 2012

Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau*.

BPPM Provinsi Riau. 2009, *Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD)*.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*.